

ExPost

Ringkasan

Laporan
Evaluasi AFD
NOMOR 107
FEBRUARI
2025

Penyusun Anne-Gaëlle Muths (Technopolis)



Laporan Evaluasi Kontribusi Grup AFD terhadap TPB di Indonesia

technopolis
group

ÉDITIONS
AFD
AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

Koordinator

Marthe-Valère Feuvrier (AFD)
Victor Fourcin (AFD)

Klausul Penafian

Informasi dan pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi para staf Grup AFD atau lembaga mitranya di Indonesia.

Foto Sampul

Heru Priyambodo, mualim KR Baruna Jaya VIII, sedang berdiri di sebuah kabin di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Indonesia, pada hari Senin, 21 Januari 2019. Kapal riset Baruna Jaya VIII adalah kapal milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

© MatahatiProductions

Daftar Isi

Kata Pengantar Hlm. 4

1

Pendahuluan Hlm. 6

- 1.1 Tujuan, metodologi, dan ruang lingkup evaluasi Hlm. 6
- 1.2 Konteks evaluasi: beberapa elemen utama Hlm. 9
- 1.3 Grup AFD di Indonesia Hlm. 10
- 1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Hlm. 10

2

Hasil Evaluasi Hlm. 12

- 2.1 Relevansi Hlm. 12
- 2.2 Efektivitas Hlm. 18
- 2.3 Koherensi Hlm. 27

Kesimpulan Hlm. 30

Lampiran A Hlm. 32

Lampiran B Hlm. 44

Akronim Hlm. 45

Kata Pengantar

Evaluasi pertama dari jenis aktivitas ini

Agence française de développement (AFD) melakukan inovasi pada tahun 2024 dengan melaksanakan evaluasi pertama Penyelarasan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari aktivitasnya di tingkat negara, yaitu Indonesia. Pengukuran penyelarasan terhadap TPB dalam program dan proyek pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan hal yang kompleks, terutama karena mempertimbangkan berbagai kesulitan serta pertanyaan metodologis. Inilah tantangan teknis dari evaluasi ini, yang prinsipnya sah dan diperlukan, seperti halnya semua kebijakan publik, serta sejalan dengan salah satu komitmen utama dari Rencana orientasi strategis Grup AFD (POS 5), yang bertujuan agar 100% proyek mereka selaras dengan TPB.

Pemilihan Indonesia

Pemilihan Indonesia sebagai negara percontohan untuk evaluasi jenis ini merupakan hal yang ambisius sekaligus relevan. Indonesia merupakan pemain penting dalam bidang pembangunan berkelanjutan, baik di kawasan Asia maupun skala global. Berbekal keanekaragaman hayati yang unik, sumber daya alam yang melimpah, jalur energinya, ukuran dan populasinya (negara terpadat ke-4 di dunia), negaraini harus menghadapi berbagai tantangan besar dan berusaha untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pengurangan kesenjangan. Evaluasi ini memungkinkan untuk membandingkan sejauh mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah diperhitungkan dengan tantangan dan dinamika keseimbangan yang dihadapi oleh negara besar yang berkembang seperti Indonesia.

Mandat strategis AFD

Dalam kerangka kerja sama bilateral antara Prancis dan Indonesia, Grup AFD menjalankan mandatnya dalam mendukung negara besar yang berkembang ini, dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan hijau dan inklusif melalui kiprahnya.

AFD berfokus pada usahanya di Indonesia pada beberapa bidang prioritas

yang menjawab kebutuhan spesifik negara ini dalam bidang pembangunan berkelanjutan: pertama-tama, dalam hal penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, dengan proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama dengan mendorong praktik-praktik berkelanjutan di sektor energi dan infrastruktur. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan kontinental, isu-isu pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut, serta lingkungan secara global, menjadi salah satu prioritas utama. Untuk menjawab tantangan urbanisasi yang pesat, AFD juga membiayai proyek-proyek infrastruktur perkotaan, terutama proyek transportasi dan mungkin di masa depan akan mencakup bidang pengelolaan limbah serta akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Upaya yang kompleks

Ibu mendasar, penyelarasan nyata antara aktivitas instansi seperti AFD terhadap TPB tampaknya merupakan hal yang wajar. Upaya ini biasanya relevan, khususnya di Indonesia, dengan dukungan AFD, yang sejak beroperasi pada tahun 2007 telah mendukung berbagai inisiatif untuk membantu negara ini dalam pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan konsep TPB yang disahkan oleh komunitas internasional pada tahun 2015.

Evaluasi kontribusi terhadap TPB oleh AFD di Indonesia bertujuan untuk mengukur kontribusi aktivitas AFD terhadap kemajuan pencapaian TPB di Indonesia. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah potret sesaat, melainkan visi yang dinamis. Evaluasi ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas tempat AFD memainkan peran yang signifikan dan dapat menjangkau sebagian dari spektrum TPB (jika mempertimbangkan ruang lingkup TPB, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di luar jangkauan suatu organisasi, sebesar apa pun itu.) Evaluasi ini juga mencakup penilaian sinergi antara peran serta AFD dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional dengan organisasi yang mumpuni dalam memperhitungkan TPB dan pengukurannya dalam proyek-proyek pembangunan, di bawah pengawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta sekretariatnya yang khusus menangani TPB.

Pengukuran yang menunjukkan hasil yang signifikan dan relatif

Hasil dan dampaknya, meskipun diukur dengan mempertimbangkan ukuran negara dan tantangan yang dihadapi, berkontribusi dalam mendukung langkah Indonesia untuk mewujudkan TPB, khususnya di bidang iklim dan lingkungan. Berkat strategi yang konsisten ini, lebih dari 60 proyek telah berhasil dilaksanakan dalam kisaran lima belas tahun terakhir (dua per tiganya dianalisis dalam kerangka evaluasi). Dimensi sektor swasta dan bantuan teknis, yang sebagian besar dilakukan oleh Proparco dan Expertise France, dapat dikembangkan dan diukur lebih lanjut di masa depan, berdasarkan tolok ukur TPB.

Evaluasi cenderung menunjukkan bahwa kiprah AFD di Indonesia ternyata selaras dengan strategi negara, relevan dengan tantangan yang dihadapi, serta menjawab serangkaian TPB yang tercantum dalam program strategis AFD periode 2017–2021 yang tercakup

dalam evaluasi ini. Pengukuran hasil dan dampak utama masih belum sempurna dan belum memuaskan, mengingat besaran relatifnya (volume peran serta AFD di Indonesia yang mencapai komitmen kumulatif sebesar 3,5 miliar € antara tahun 2007 hingga 2023, untuk negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia). Kiprah AFD juga telah berkontribusi pada beberapa kemajuan besar secara kuantitatif dan kualitatif: pengurangan emisi CO₂, perlindungan lingkungan darat dan laut, peningkatan infrastruktur perkotaan di wilayah-wilayah padat penduduk yang berdampak langsung pada kualitas hidup penduduk setempat, serta peningkatan layanan keuangan. Metode kerja yang bersifat partisipatif dan berbasis kemitraan telah mendapatkan sorotan, sama halnya dengan kontribusi pembiayaan bersama antar donor, maupun nilai tambah sumber daya bantuan teknis, meskipun dalam jumlah kecil, untuk memperkuat hasil pembiayaan pinjaman.

Praktik evaluasi yang perlu didorong dan disempurnakan, serta praktik operasional yang perlu diperkaya

Evaluasi ini berfungsi untuk merumuskan rekomendasi guna memperkuat efektivitas proyek-proyek AFD di masa depan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Dirancang sebagai “percontohan” untuk direplikasi di masa depan, evaluasi ini memberikan pelajaran

metodologis mengenai praktik evaluasi TPB dan mengenai penerapan operasional strategi AFD di tingkat negara.

Dalam kerangka evaluasi ini, berbagai tantangan dari aktivitas sebuah instansi pembangunan berhasil diidentifikasi, antara lain: diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah daerah untuk melakukan penyelesaian kiprah AFD secara lebih spesifik dengan rencana pembangunan negara; koherensi aktivitas Grup yang perlu ditingkatkan di negara tersebut; kewaspadaan yang perlu diperbarui terhadap sifat keberlanjutan operasi, dan oleh karena itu, perlunya perhatian untuk memperkuat kapasitas lokal serta kelayakan proyek dan program; dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran, karena TPB kini sepenuhnya terintegrasi ke dalam “tata bahasa” para pemangku kepentingan, dalam hal pengukuran dampak: *ex ante* dalam definisi operasi dan perangkat statistiknya, untuk mengumpulkan data dengan lebih baik, *ex post* untuk analisis dan evaluasi dampak jangka panjang, dan *in fine* menyesuaikan peran serta.

Grup AFD saat ini sedang menyelesaikan Rencana Orientasi Strategis kelimanya, yang salah satu komitmen utamanya adalah **“100% proyek yang selaras dengan TPB” (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**. Dalam konteks ini, AFD ingin memulai refleksi mengenai cara pendekatan evaluasi TPB di tingkat negara. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi **proyek** percontohan. Untuk menyusun pendekatan evaluatif ini, terdapat empat kriteria yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan negara yang dianggap relevan untuk menganalisis kontribusi Grup AFD terhadap TPB:

- Dukungan dan kematangan refleksi mengenai TPB di negara yang disasar
- Keanggotaan negara tersebut dalam daftar negara prioritas di tingkat AFD untuk melakukan penelitian mengenai jalur TPB negara tersebut, serta kontribusi AFD dalam hal ini
- Total pendanaan kumulatif yang melebihi 1 miliar euro sejak tahun 2015
- Niat untuk segera bekerja dalam penyusunan strategi negara

Poin terakhir yang berkaitan dengan hubungan antara refleksi TPB dan strategi negara telah diperkuat untuk menganalisis hasil dari proyek-proyek yang diberikan selama periode 2015–2022.

Yann Martres,
Direktur Kantor AFD di Jakarta

1. Pendahuluan^[1]

1.1 Tujuan, metodologi, dan ruang lingkup evaluasi

1.1.1 – Tujuan

Dokumen ini merangkum laporan evaluasi kontribusi Grup AFD terhadap TPB di Indonesia. Ambisi dari evaluasi ini, bagi Grup AFD, adalah “**memberikan masukan untuk refleksi Grup AFD mengenai peningkatan kinerjanya di Indonesia, dengan fokus utama pada TPB dan kontribusinya terhadap kemajuan negara ini menuju pencapaian TPB**”. Hal tersebut melibatkan dua tujuan utama spesifik:

[1] Tim evaluasi Technopolis, yang terdiri atas Anne-Gaëlle Muths, Ann Livingston, Alice Barilet, Pauline Pasquier, dan Simon Varron mengucapkan terima kasih kepada Joseph Viandrito, pakar Indonesia, serta SDG Hub Universitas Indonesia (UI), atas kerja samanya yang berharga.

- Menganalisis relevansi aktivitas Grup AFD pada periode 2015–2022^[2]. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil awal dari proyek-proyek yang telah selesai serta mengevaluasi rancangan proyek yang sedang berjalan. Evaluasi ini juga menganalisis koherensi peran serta Grup AFD dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di Indonesia oleh para donor utama internasional.

- Menganalisis, dalam kerangka strategis Grup AFD, kontribusi portofolio Grup AFD terhadap TPB di Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan evaluatif yang menyusun evaluasi ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

[2] Rencana strategis AFD tahun 2017–2021 di Indonesia adalah kerangka strategis utama dalam analisis ini. Dokumen rencana strategis untuk proyek-proyek yang diberikan pada tahun 2015/awal 2016 adalah rencana strategis tahun 2013–2015. Rencana strategis tahun 2022–2026 tidak termasuk dalam cakupan evaluasi.

Tabel 1 – Pertanyaan evaluasi

Pertanyaan evaluasi umum	P1 – Sejauh mana Grup AFD, melalui pendanaan maupun dialog kebijakan publik yang dilakukannya, mendukung para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya mengintegrasikan TPB ke dalam kebijakan publik untuk pembangunan berkelanjutan, dengan menggabungkan pembangunan ekonomi dan manusia, serta menghormati batasan ekologis?
Prioritas isu-isu pembangunan berkelanjutan serta penyesuaian dengan prioritas Indonesia	P2 – Sejauh mana Grup AFD memprioritaskan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam rencana strategis dan investasinya di Indonesia, sejalan dengan prioritas yang ditetapkan oleh para mitranya di Indonesia (prioritas bersama dan perbedaan antara rencana strategis Prancis dan Indonesia)?
Faktor pendorong dialog rencana strategis terkait isu-isu ini	P3 – Apa saja peluang dan hambatan untuk mengintegrasikan isu-isu TPB ke dalam dialog kebijakan publik yang dilakukan antara Grup AFD dan para mitranya di Indonesia?

Penyelarasan <i>ex ante</i> aktivitas Grup AFD dengan TPB	P4 - Sejauh mana portofolio proyek yang dibiayai oleh AFD selaras dengan TPB? Sejauh mana portofolio ini sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: i) tidak merugikan pencapaian TPB; ii) mengoptimalkan dampak positif terhadap TPB yang disasar, dengan mengedepankan proyek-proyek yang “berdampak besar”; iii) mengupayakan sinergi antarTPB?
Penyelarasan berbagai aktivitas Grup AFD dengan TPB (efektivitas di seluruh tahapan proyek)	P5 - Sejauh mana ambisi dan dampak yang dinyatakan di awal proyek dalam hal pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud selama dan setelah tahap implementasi?
Akuntabilitas atas penyelarasan TPB	P6 - Bagaimana kapasitas AFD dalam melaporkan kontribusinya terhadap jalur pembangunan berkelanjutan di Indonesia (alat dan indikator)?
Efektivitas komparatif alat pembiayaan	P7 - Sejauh mana perbedaan alat pembiayaan dan bantuan teknis AFD memungkinkan untuk bekerja pada keterkaitan antarTPB?
Keterkaitan antarTPB dalam lingkup Grup AFD	P8 - Bagaimana proyek-proyek yang didanai oleh Grup AFD saling memperkuat untuk berkontribusi terhadap jalur TPB pemerintah Indonesia?
Kapasitas Grup AFD dalam memobilisasi pemangku kepentingan lainnya (fokus pada sektor swasta)	P9 – Seberapa besar kapasitas Grup AFD dalam memobilisasi pemodal lain atau pemodal swasta untuk proyek-proyek transformatif, yaitu proyek-proyek yang terstruktur bagi TPB?
Perbandingan dengan pihak internasional lainnya	P10 - Bagaimana strategi dan aktivitas AFD dibandingkan dengan mandat pendonor dana utama lainnya yang hadir di negara ini (WB, ADB, JICA, KfW)?

Ringkasan ini memberikan deskripsi singkat mengenai konteks dan menyajikan jawaban atas berbagai pertanyaan evaluasi, serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait aktivitas Grup AFD di Indonesia dan TPB.

1.1.2 – Metodologi

Evaluasi ini didasarkan pada investigasi berikut:

- Analisis dokumenter terhadap strategi pembangunan Indonesia dan strategi AFD di negara ini;
- Analisis terhadap dokumentasi TPB di Indonesia dan perkembangan kerangka strategis AFD terkait isu tersebut;
- Analisis dokumenter terhadap proyek-proyek dan konteks Indonesia, serta strategi nasional;
- Wawancara dengan tim-tim proyek AFD;
- Wawancara yang dilakukan di Jakarta dengan para pemangku kepentingan di Indonesia, Prancis, dan internasional;
- Lima studi kasus dengan tema-tema sebagai berikut:
 - Pendekatan tematik: mempromosikan energi terbarukan dan efisiensi energi; pelestarian kawasan alami pesisir dan laut.
 - Pendekatan lintas fungsional: bantuan teknis; mobilisasi sektor swasta; gender.
- Analisis komparatif yang berfokus pada Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), dan Bank Pembangunan Jerman (KfW), mitra pembangunan utama AFD di Indonesia selama periode yang dikaji.

Rekomendasi dirumuskan **setelah melakukan triangulasi** terhadap semua investigasi dan pertukaran dengan mitra Prancis dan Indonesia. **Rekomendasi ini berkaitan dengan aktivitas Grup AFD di Indonesia antara tahun 2015 dan 2022, maupun perkembangan dalam pengarusutamaan TPB selama periode tersebut.** Dalam beberapa kasus, rekomendasi ini menyoroti berbagai aktivitas yang telah diinisiasi oleh Grup AFD, serta perlunya melanjutkan dan meningkatkan intensitasnya.

1.1.3 – Ruang lingkup

Evaluasi ini mencakup **44 proyek^[3] yang didukung oleh Grup AFD di Indonesia**: 25 proyek yang telah selesai dan ditandatangi antara tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2022, serta 19 proyek yang masih berjalan (lihat daftar proyek yang termasuk dalam cakupan evaluasi pada lampiran A).

Evaluasi ini dilakukan dengan dukungan **tata kelola ganda** yaitu, di satu sisi, kelompok rujukan yang melibatkan mitra Indonesia (Kementerian Perencanaan/Bappenas, PTSMI – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/bank BUMN Indonesia untuk pendanaan infrastruktur –, perwakilan Dewan Penasihat AFD di Indonesia), serta perwakilan AFD (kantor AFD di Jakarta dan perwakilan Grup AFD di Paris), dan di sisi lain, kelompok rujukan Prancis yang melibatkan berbagai perwakilan Grup AFD dan tim Prancis, serta mitra eksternal yang memiliki keahlian khusus terkait TPB maupun sektor swasta.

1.1.4 – Rincian Metodologis

- Evaluasi ini mencakup **dua bidang analisis**: baik evaluasi terhadap aktivitas yang didukung oleh Grup AFD di Indonesia pada periode 2015-2022 maupun evaluasi terhadap kontribusi Grup AFD terhadap TPB dalam periode yang sama.
- Evaluasi ini mencakup **Grup AFD secara keseluruhan**. Mobilisasi dari ketiga elemen Grup (AFD, Proparco, dan Expertise France) di Indonesia tidak merata dalam hal tingkat peran serta. Bahkan, AFD memainkan peran yang jauh lebih penting dalam evaluasi.
- **Bobot keuangan AFD** di Indonesia: meskipun pembiayaan AFD di Indonesia cukup signifikan selama periode evaluasi, yaitu termasuk 10 besar mitra global AFD di seluruh dunia dan berada pada posisi ke-2 di Asia setelah India, namun dampak keuangannya tetap relatif kecil dibandingkan PDB negara besar yang

[3] Penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam evaluasi ini: semua proyek adalah proyek yang diprakarsai oleh mitra Indonesia dan dibiayai oleh AFD; oleh karena itu, istilah "peran serta AFD" atau "proyek AFD" yang mungkin digunakan adalah singkatan yang tidak tepat dan harus selalu dipahami sebagai "proyek/peran serta yang dilakukan oleh mitra Indonesia dan dibiayai/didukung oleh AFD".

berkembang ini. Pembobotan ini juga berkurang jika dibandingkan dengan kontribusi WB dan ADB, yang secara bersama-sama menyumbang hampir 50% dari Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) di Indonesia. Pada tahun 2021, Prancis merupakan penyumbang bantuan bilateral terbesar ke-4.

• Analisis TPB:

- Evaluasi ini mencakup periode 2015-2022, tahun-tahun pertama dari agenda tahun 2030. Pada periode evaluasi, penerapan konkret TPB masih dalam tahap perumusan.
- Selain itu, relevansi pendekatan TPB tidak terletak pada keberagaman tema yang dicakup secara terpisah, melainkan pada pendekatannya yang spesifik dan holistik. Untuk mewujudkan hal tersebut, evaluasi ini mengusulkan analisis terhadap berbagai prinsip yang diadopsi oleh AFD: keterkaitan antara TPB, penghormatan terhadap prinsip ‘Do No Harm’ dan ‘Leave no one behind’ (khususnya bagi kelompok yang paling rentan), serta pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat transformatif.

1.2 Konteks evaluasi: beberapa elemen utama

1.2.1 – Konteks Indonesia

- **Ekonomi terbesar keenam belas di dunia dan diakui sebagai salah satu dari 17 negara ‘megabiodiversitas’**, Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut dan darat yang tak tertandingi.
- Perekonomiannya ditandai oleh **sektor jasa yang berkembang pesat** (50% dari angkatan kerja pada tahun 2021). **Sektor pertanian** menyerap 28% dari angkatan kerja. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, negara ini memperoleh sebagian pendapatannya dari eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam. Indonesia adalah produsen energi yang penting. Produksi energi ini didominasi oleh energi fosil: batu bara (67%), gas alam (11%), dan minyak bumi (7,5%). Porsi energi terbarukan (terutama biomassa dan panas bumi) masih terbatas (14%). Indonesia menempati peringkat ke-9 dunia dalam cadangan batu bara, peringkat ke-3

dalam produksi batu bara, dan peringkat pertama sebagai pengekspor (28% ekspor global pada tahun 2023)^[4]. **Kombinasi sumber energi ini memunculkan tantangan signifikan terkait transisi yang berkeadilan dan dekarbonisasi ekonomi.**

- Selama sepuluh tahun terakhir, **kemajuan aspek sosial-ekonomi yang signifikan** telah dicapai, hal tersebut terutama tercermin dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, dari 14,1% pada 2009 menjadi 9,4% pada 2023^[5], serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, sekitar 40% dari populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan upaya pengurangan ketimpangan stagnan sejak tahun 2019^[6], dalam konteks ketimpangan regional yang tinggi.
- Urbanisasi yang pesat memiliki **dampak besar terhadap lingkungan**, terutama dalam hal pencemaran udara dan air. Dengan hampir 1,5 gigaton setara CO₂ (CO₂e) yang dilepaskan setiap tahun, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
- Perubahan iklim memperburuk **risiko bencana alam** yang sudah ada, terutama banjir, yang merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerusakan cukup besar.
- Untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ini, Indonesia telah mengadopsi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)** yang menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Indonesia untuk periode 2005-2025. Kebijakan nasional ini dibagi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan (RPJMN), kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan yang masing-masing dilengkapi dengan tujuan, strategi, dan anggaran.

[4] Sumber: Badan Energi Internasional (IEA)

[5] Sumber: Bank Dunia, platform mengenai kemiskinan dan ketimpangan: pip.worldbank.org/country-profiles/IDN

[6] Sumber: Bank Dunia : Gini index – Indonesia | Data (worldbank.org)

1.3 Grup AFD di Indonesia

Grup AFD, terdiri dari AFD, Proparco, dan Expertise France, merupakan pemain yang tergolong baru dalam lanskap Indonesia: AFD mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2007, Proparco pada tahun 2011, dan Expertise France pada tahun 2018. Strategi Grup AFD di Indonesia adalah **berkontribusi pada pembangunan**

sosial-ekonomi negara dan komitmen internasional dalam upaya memerangi perubahan iklim. Sejak tahun 2017, AFD menginvestasikan rata-rata 250 hingga 300 juta euro setiap tahun, terutama dalam bentuk pinjaman dan hibah dari pemerintah dan non-pemerintah. Portofolio Grup AFD untuk periode 2015-2022 mencakup 44 aktivitas, dengan total nilai sebesar 1.633 juta euro.

Kotak 1 – Angka utama portofolio Grup AFD di Indonesia tahun 2015-2022

AFD (32 proyek)

- Setengah dari proyek AFD (16 dari 32) telah rampung, mencakup 73% dari total pembiayaan AFD
- 32% dari dana dialokasikan untuk pelestarian lingkungan pesisir dan laut, 26% untuk sektor tata kelola pemerintahan, dan 25% untuk sektor energi.
- Pendanaan AFD dalam bentuk pinjaman kebijakan publik mencapai total sebesar 1.140 juta euro (74% dari total pembiayaan AFD di Indonesia).

Proparco (4 proyek)

- Proyek-proyek Proparco difokuskan terutama pada sektor intermediasi keuangan, dengan empat proyek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha kecil, menengah, dan mikro di sektor formal maupun informal.

Expertise France (8 proyek)

- Dua dari delapan proyek Expertise France berada di tingkat nasional, sementara yang lainnya merupakan proyek regional. Salah satu proyek terkait dengan pendanaan AFD.

1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

1.4.1 – Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap TPB

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap TPB: TPB telah terintegrasi ke dalam RPJMN yang dipimpin oleh tim koordinasi nasional TPB, di bawah pimpinan Menteri Bappenas. Pada tingkat global, Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2023 menunjukkan bahwa **Indonesia berada di peringkat ke-75 di dunia, yang merupakan peningkatan yang signifikan** dibandingkan tahun 2019, yaitu di peringkat ke-102.

1.4.2 – Komitmen Grup AFD terhadap TPB

Agenda tahun 2030 menjadi referensi bersama bagi ketiga entitas Grup. AFD berkontribusi terhadap agenda ini dengan berkomitmen untuk TPB melalui **mekanisme Analisis dan Pendapat Pembangunan Berkelanjutan** (APPB/AADD). Mekanisme ini menjamin keselarasan proyek yang didanai oleh AFD dengan TPB, sekaligus berkontribusi pada pengembangan strategi global yang berorientasi pada tujuan-tujuan tersebut. Expertise France dan Proparco telah mengadopsi mekanisme analisis pengembangan berkelanjutan yang sebanding dengan AFD, dan menyesuaikannya dengan mandat spesifik dan siklus proyek masing-masing.

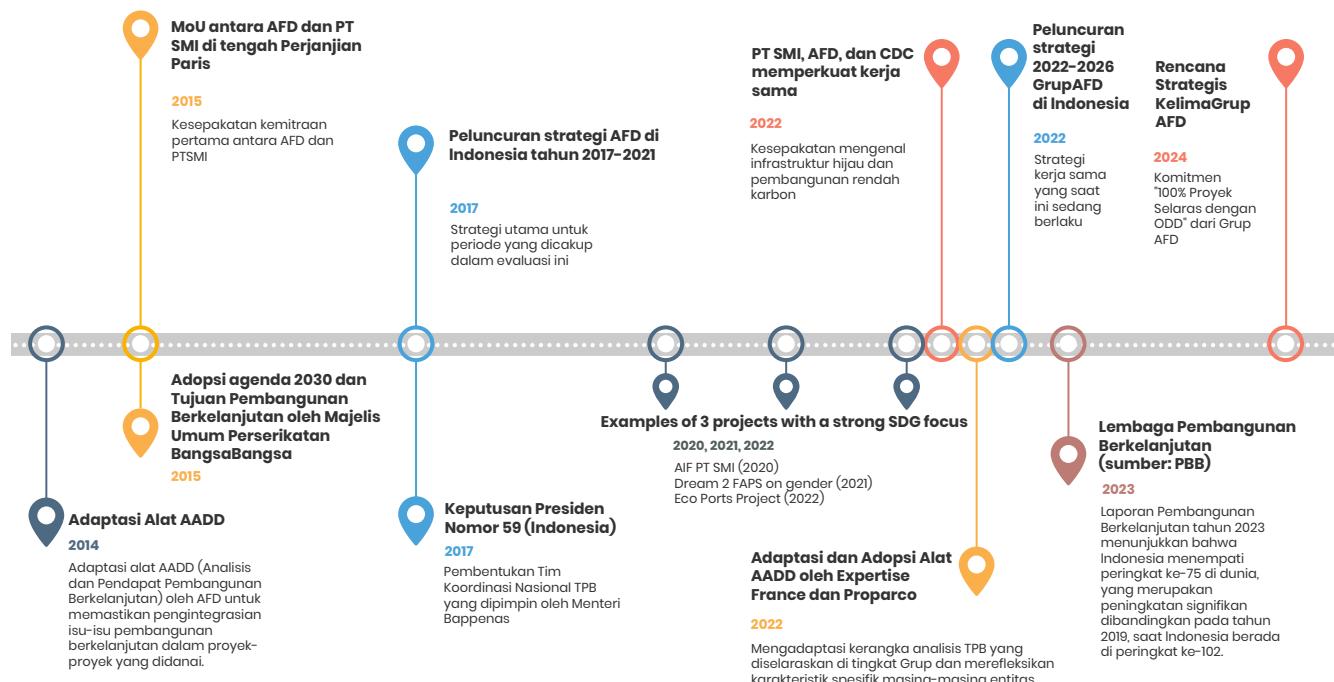
Kotak 2 – Alat Analisis dan Pendapat Pembangunan Berkelanjutan (AADD)

Diluncurkan pada tahun 2014, AADD adalah sebuah mekanisme analisis yang berfungsi sebagai pemeriksaan terperinci *ex-ante* terhadap dampak yang diharapkan dari proyek terhadap seluruh 17 TPB yang tercakup dalam enam dimensi pembangunan berkelanjutan: keanekaragaman hayati, iklim, sosial, gender, ekonomi, dan tata kelola. Proyek-proyek dievaluasi berdasarkan keenam dimensi ini, dengan skor yang diberikan untuk masing-masing dimensi menggunakan kisi-kisi analisis. Pendapat independen tentang pembangunan berkelanjutan juga disediakan untuk setiap proyek, yang dikeluarkan oleh tim yang hadir pada setiap tahap utama penilaian. Pendapat independen dan formal ini menginformasikan keputusan pemberian hibah.

Skema 1 – Tahapan utama dalam kerja sama antara Indonesia dan Grup AFD terkait TPB periode 2015-2022

Lini masa di bawah ini menyajikan tahapan utama kerja sama antara Indonesia dan Grup AFD selama periode yang tercakup dalam evaluasi (2015-2022). Gambar ini menunjukkan elemen-elemen umum dari konteks kerja sama (bagian atas) dan menyajikan fokus pada bagaimana TPB diperhitungkan dalam kerja sama ini (bagian bawah). Ketiga proyek yang disebutkan dalam lini masa ini secara eksplisit menyoroti TPB: AIF dan PT SMI, Dream Faps 2 yang berfokus pada isu gender dan Ecoports (lihat kotak 4 dan 5, halaman 14 dan 16 tentang efektivitas, serta tabel proyek pada lampiran A). Proyek-proyek yang disebut dalam lini masa ini tidak dimaksudkan untuk mencerminkan seluruh aktivitas AFD di Indonesia, melainkan untuk menyoroti contoh-contoh integrasi refleksi TPB dalam proyek tertentu.

Indonesia dan Grup AFD – 2015-2022



Pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan dan TPB

2. Hasil Evaluasi

Bagian ini menampilkan poin-poin utama dari evaluasi yang disusun berdasarkan tiga kriteria, yaitu: relevansi, efektivitas, dan koherensi. Setelah analisis dilakukan untuk masing-masing kriteria, terdapat penilaian serta rekomendasi yang diberikan.

2.1 Relevansi

2.1.1 – Peran serta Grup AFD selaras dengan prioritas Indonesia sambil memastikan konsistensi dengan ambisi iklim Grup

Strategi peran serta AFD di Indonesia sangat koheren sejak pendanaan pertama pada tahun 2007. Faktanya, orientasi-orientasi utama tidak berubah selama bertahun-tahun: lingkungan dalam arti luas, transisi rendah karbon, kota berkelanjutan, dan pertumbuhan biru. Orientasi strategis ini selaras dengan orientasi pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam dokumen utama kebijakan nasional, RPJMN yang menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Indonesia untuk periode 2005–2025 (lihat Tabel 2).

Tabel 2 – Kesesuaian antara tujuan prioritas AFD dan arah strategi pembangunan Indonesia

Tujuan Prioritas AFD (Strategi 2017–2021)	RPJMN 2015–2019
Promosi energi terbarukan dan efisiensi energi	Kedaulatan energi dan listrik (salah satu dari 4 dimensi pembangunan sektor primer RPJMN).
Peningkatan layanan publik perkotaan	Dimensi ini tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dimensi prioritas pembangunan dalam RPJMN, tetapi RPJMN membahas transportasi perkotaan dan perumahan sosial.
Pengelolaan lahan dan ekosistem berkelanjutan	Dimensi ini tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dimensi prioritas pembangunan dalam RPJMN, tetapi RPJMN menargetkan prioritas terkait seperti ekosistem maritim dan kelautan.
Peningkatan konektivitas maritim	Dimensi maritim dan kelautan (salah satu dari empat dimensi pembangunan sektor primer RPJMN)
Peningkatan efisiensi keuangan publik	Tata kelola dan reformasi (salah satu dari empat kondisi yang diperlukan untuk pembangunan RPJMN)

Keterangan: Coklat muda – prioritas utama – Ungu: prioritas yang sesuai secara tidak langsung

Dua sektor prioritas menjadi kepentingan bersama bagi pemerintah Indonesia dan AFD:

- Pengelolaan sumber daya dan kawasan pesisir serta laut, serta dukungan terhadap aktivitas kemaritiman: 32% dari portofolio.
- Transisi rendah karbon dan transisi energi: 25% dari portofolio selama periode evaluasi dalam hal pembiayaan dari AFD.

Kiprah AFD difokuskan pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan keahlian yang sangat tinggi.

Kotak 3 – Penyelarasan berbagai proyek yang didanai oleh AFD dengan strategi Indonesia terkait wilayah laut dan pesisir

Keikutsertaan AFD di wilayah laut dan pesisir sangat sejalan dengan strategi Indonesia, mengingat sektor kelautan merupakan salah satu fokus utama dalam prioritas nasional:

- Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2017 disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 berdasarkan visi pembangunan Indonesia (diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2017) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- RPJMN menetapkan prioritas strategis Indonesia dalam jangka waktu lima tahun (2015–2019).

Otoritas Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta lembaga seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) telah mengajukan pembiayaan kepada AFD untuk proyek-proyek seperti proyek KRisNA, *Supporting Indonesia Research Capacity in Oceanography* (CID1077), proyek *Ecofishing Ports* (CID1109), serta proyek meteorologi kelautan (CID1080). Proyek-proyek investasi ini mencakup bantuan teknis khusus untuk tahap persiapan, pelaksanaan, serta pertukaran antar rekan sejawat.

Beberapa faktor yang mempermudah penyelarasan peran serta AFD dengan prioritas Indonesia:

- Dialog politik tingkat tinggi antara Prancis dan Indonesia serta keberadaan kemitraan strategis. Surat pernyataan minat telah ditandatangani pada tahun 2017 oleh Prancis dan Indonesia terkait kerja sama bilateral di sektor perikanan dan kelautan.
- Pendekatan bertahap yang menggabungkan bantuan teknis untuk membantu para *pemangku kepentingan* di Indonesia dalam mempersiapkan proyek-proyek yang didanai oleh AFD serta proyek-proyek percontohan. Sebagai contoh, proyek *Ecofishing Ports* (CID1109) bertujuan untuk menguji pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan, yang nantinya dapat diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia.
- Hubungan jangka panjang antara AFD dan Indonesia di sektor ini mendorong terjadinya dialog antara kedua belah pihak dan menjadikan AFD sebagai mitra terpercaya.

Kotak 4 – Penyelarasan pembiayaan AFD dengan strategi Indonesia di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi

Hasil kajian menunjukkan bahwa, selama periode yang diteliti, peran serta AFD selaras dengan berbagai strategi Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan:

- Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang ditetapkan pada tahun 2017 menegaskan kembali target pengurangan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan berfokus pada lima sektor prioritas, termasuk sektor energi^[7].
- Dalam kerangka NDC (National Determined Contribution) yang dipublikasikan pada tahun 2015, Indonesia telah merencanakan pengurangan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 tanpa dukungan eksternal dan sebesar 41% jika didukung oleh pendanaan internasional. Indonesia juga menetapkan target pengurangan emisi GRK tanpa syarat sebesar 29% pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia menargetkan 23% energi terbarukan dalam bauran energi primer pada tahun 2025. Target-target ini berasal dari Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada bulan September 2022, Indonesia menyerahkan NDC yang ditingkatkan kepada Sekretariat UNFCCC, dengan target pengurangan emisi tanpa syarat yang ditingkatkan menjadi 31,89% dan target bersyarat yang ditingkatkan menjadi 43,20% apabila negara menerima pendanaan internasional tambahan^[8].
- Sektor energi menjadi prioritas dalam RPJMN 2015–2019 dan juga mendapat perhatian besar dalam RPJMN 2020–2024.

AFD telah mendukung aspek-aspek utama dalam transisi energi di Indonesia, khususnya dalam hal investasi di bidang energi terbarukan. AFD telah memberikan dukungan terhadap:

- Pengembangan kerangka kebijakan yang mendukung: Program untuk energi yang berkelanjutan dan inklusif tahap 1 dan 2 (CID1061, CID1067).
- Akses universal terhadap listrik: Program energi yang berkelanjutan dan inklusif tahap 1 dan 2 (CID1061, CID1067).
- Dalam hal dukungan terhadap energi terbarukan: Program energi yang berkelanjutan dan inklusif tahap 1 dan 2 (CID1061 dan CID1067), studi teknis serta lingkungan dan sosial (E&S) untuk proyek pembangkit listrik tenaga air di Masang II (CID1095), studi kelayakan untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin di Banten (CID1119), serta dukungan dalam penyusunan strategi pengembangan energi angin, PT SMI II: lini kredit kepada PT SMI untuk mendorong pembiayaan infrastruktur hijau yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (CID1083), bantuan teknis dalam persiapan proyek, insentif investasi,
- Serta penguatan kapasitas PT SMI (CID1085 dan CID1090).
- Efisiensi energi: Proyek SIEP dan PT SMI berkaitan dengan efisiensi energi.

Transisi sektor energi di Indonesia akan membutuhkan waktu karena bauran energi saat ini masih didominasi oleh batu bara. Sektor ini merupakan sumber utama pendapatan dan lapangan kerja di beberapa wilayah. Pengurangan bertahap porsi penggunaan batu bara dengan tujuan menurunkan emisi GRK, akan berdampak pada keseimbangan sosial dan ekonomi di negara ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi AFD dan para donor lainnya untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dalam jangka panjang terkait hal ini.

[7] AFD, Kerangka Peran serta Negara untuk Indonesia 2017–2021, versi yang disampaikan kepada Dewan Direksi pada 21 Desember 2017.

[8] https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf

Meskipun strategi global selaras, tingkat prioritas ambisi dapat berbeda antara AFD dan pihak Indonesia. Analisis mendalam terhadap strategi dan proyek menunjukkan kompleksitas operasional dari **upaya penyelarasan ini yang bertujuan untuk mendukung ambisi sosial-ekonomi Indonesia sekaligus menghormati ambisi lingkungan yang diusung oleh AFD.** Memang, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tantangan besar, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun komitmen penting baru-baru ini telah dibuat untuk mendukung isu-isu lingkungan, beberapa keputusan politik masih dapat memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sejalan dengan itu, ambisi Grup AFD terkait manfaat bersama untuk iklim di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, tergolong tinggi, sejalan dengan mandatnya yang berfokus pada isu iklim dan pertumbuhan hijau. Analisis juga mengungkapkan bahwa selama periode yang dikaji, sektor-sektor seperti efisiensi energi dan konservasi hutan belum dapat dibiayai melalui skema pinjaman, meskipun AFD menaruh minat pada bidang-bidang tersebut.

2.1.2 – Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam berbagai peran serta AFD masih tergolong baru dan belum merata; hal ini didukung oleh proses dan perangkat kuat yang telah disiapkan oleh Grup AFD pada tahap perancangan proyek.

Strategi AFD periode 2017–2021 mencakup sebagian besar periode yang dikaji dalam evaluasi ini, merujuk pada TPB. Agenda 2030 disebutkan dan TPB yang terkait dengan bidang peran serta AFD juga dicantumkan, yaitu:

- TPB 7: Menjamin akses energi yang andal, berkelanjutan, modern, dan terjangkau bagi semua orang;
- TPB 10: Mengurangi kesenjangan dalam negeri dan antarnegara;
- TPB 11: Mенаджикан kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- TPB 15: Melestarikan dan memulihkan ekosistem daratan;
- TPB 16: Mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan.

Namun, mengingat waktu pengesahannya (2017), strategi tersebut belum memuat rujukan yang lebih ambisius terhadap TPB. Pada saat itu, belum ada pendekatan menyeluruh terhadap TPB, seperti analisis kesenjangan (*gap analysis*) terkait TPB atau hubungan potensial di antara keduanya. Meskipun diakui bahwa tantangan pembangunan saling berdampingan, tidak disebutkan adanya pendekatan yang lebih mendalam dan operasional untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Secara bertahap dan signifikan, pada akhir periode yang dievaluasi, AFD telah menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mengintegrasikan TPB dalam tahap perancangan proyek. Kerja tim khusus AFD, yaitu divisi AES dan AADD^[9], serta mekanisme ADD, memungkinkan untuk memastikan bahwa selain merujuk pada masing-masing TPB secara individual (misalnya, sebuah proyek energi terbarukan yang mencentang kotak TPB 7), upaya juga dilakukan untuk mengintegrasikan TPB dalam pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, analisis proyek menunjukkan bahwa isu-isu terkait TPB semakin diperhatikan seiring berjalannya waktu. Keterkaitan antar TPB pun menjadi lebih jelas, mencerminkan tekad yang nyata untuk melakukan transformasi yang lebih ambisius.

Integrasi satu atau beberapa prinsip yang telah ditetapkan oleh AFD terkait penerapan TPB^[10] dalam proyek-proyek masih berlangsung secara tidak merata. Memang, perumusan suatu proyek harus mempertimbangkan berbagai kendala. Oleh karena itu, integrasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap prinsip-prinsip dalam Agenda 2030, yang mencakup TPB, tidak selalu mudah dilakukan. Terlihat bahwa proyek-proyek yang lebih baru (sejak tahun 2020) semakin banyak memasukkan prinsip-prinsip ini, mencerminkan perhatian yang lebih besar dari AFD terhadap integrasi yang efektif atas TPB dalam proyek-proyeknya (Kotak 5 dan Gambar 1). Jumlah proyek yang dinilai sebagai proyek “transformasional” oleh AFD juga meningkat sejak tahun 2020.

[9] AES (Appui environnemental et social): Dukungan Lingkungan dan Sosial / AADD (Analyse et avis développement durable): Analisis dan Pendapat Pembangunan Berkelanjutan

[10] Keempat prinsip tersebut adalah: Keterkaitan antar TPB, Tidak Menimbulkan Dampak Negatif, Pelaksanaan Proyek yang Bersifat Transformasional (yaitu yang mendapat skor +3 pada setidaknya dua dimensi dalam tinjauan pembangunan berkelanjutan), dan Fokus pada kelompok yang paling rentan.

Di luar proses dan hasil, menarik untuk memperhatikan **posisi tim AFD yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan proyek, serta pemahaman mereka terhadap sifat holistik dari TPB**. Meskipun sebagian besar narasumber dari AFD menyatakan memiliki pemahaman umum yang baik tentang Agenda 2030 dan TPB, bagi sebagian besar dari mereka, integrasi TPB

sering kali terbatas pada penyetaraan dengan salah satu dari 17 tujuan tersebut. Selama periode evaluasi (2017–2021), cara Agenda 2030 seharusnya mengubah perumusan strategi dan proyek, tampaknya belum sepenuhnya dikuasai oleh tim. Sejak saat itu, mekanisme penyebarluasan dan pendampingan yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik dari sudut pandang global.

Kotak 5 – Integrasi keterkaitan antarTPB dalam proyek-proyek

Beberapa proyek yang didukung oleh AFD dan dianalisis dalam evaluasi ini menunjukkan pendekatan holistik terhadap TPB, baik dalam perancangan proyek maupun dalam mekanisme operasionalisasinya, dengan penjelasan mengenai bagaimana keterkaitan antar-TPB diperhitungkan.

Contoh pertama adalah proyek **Ecofishing Ports (CID1109)**. Proyek ini bertujuan untuk berkontribusi secara signifikan pada berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta tata kelola sektor perikanan. Risiko bahwa aspek ekonomi akan mendominasi TPB lainnya telah diidentifikasi pada tahap perancangan. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan telah direncanakan dalam perancangan proyek dan tim proyek telah merundingkan komitmen kontraktual dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (misalnya, peningkatan kualitas data tangkapan dan ketertelusuran, bangunan hemat energi, serta infrastruktur yang tanggap terhadap Rencana Aksi Iklim).

Perancangan proyek **PT SMI II: jalur kredit untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur ramah iklim (CID1083)**^[11] juga mengintegrasikan pendekatan holistik terhadap TPB^[12]. Mengingat sifatnya, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, AFD mengevaluasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang ada di PT SMI saat tahap penilaian proyek dan menilainya memadai (meliputi kebijakan lingkungan dan sosial, prosedur, alat, pengorganisasian sumber daya manusia, sistem pelatihan, laporan, dll.). PT SMI berkomitmen untuk menerapkan prosedur-prosedur ini pada proyek-proyek yang dibiayai melalui jalur kredit serta menerapkan ESMS-nya dalam pelaksanaan fasilitas kredit, seperti yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Sebuah hibah dari Uni Eropa juga telah dimobilisasi untuk mendukung PT SMI dalam penerapan prosedur lingkungan dan sosial (E&S). Selain itu, daftar pengecualian AFD, yang mencakup kriteria E&S, juga dilampirkan dalam perjanjian pembiayaan dan diperiksa untuk setiap potensi investasi.

[11] Lihat Lampiran A untuk deskripsi singkat proyek.

[12] Mengacu pada dua prinsip dasar bagi AFD untuk lebih mempertimbangkan TPB, yaitu: tidak merugikan pencapaian salah satu TPB dan mengupayakan sinergi antar TPB.

Tabel 3 – Penilaian evaluasi terhadap pencapaian kriteria relevansi dan rekomendasi

	SM	M	TM	STM		Ruang gerak grup AFD
Penyelarasan peran serta Grup AFD terhadap prioritas Indonesia					Peran serta Grup AFD sejalan dengan prioritas Indonesia, di mana strategi dan proyek yang didukung dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintah Indonesia. Namun, Grup AFD terkadang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan prioritas mitra Indonesia dengan mandatnya untuk memerangi perubahan iklim.	++
Integrasi TPB dalam strategi (1)					Integrasi TPB masih berada pada tahap awal selama periode evaluasi dari sudut pandang strategis, dengan adanya referensi sektoral namun masih minim perhatian terhadap keterkaitan antar-TPB.	+++
Integrasi TPB dalam proyek (2)					Integrasi TPB dalam proyek didukung oleh proses dan alat yang kuat selama tahap perancangan proyek (alat AADD).	+++
Akulturasi tim Grup AFD terhadap pendekatan holistik TPB					Pendekatan holistik terhadap TPB yang dikembangkan oleh AFD dan implikasinya terhadap perumusan serta pelaksanaan proyek belum sepenuhnya terintegrasi di dalam tim. Tingkat integrasi ini bervariasi antar tim, sehingga diberikan penilaian ganda.	+++

Keterangan: SM Sangat memuaskan, M Memuaskan, TM Tidak memuaskan, STM Sangat tidak memuaskan

+++ Ruang gerak besar, ++ tanggung jawab bersama, + ruang gerak terbatas

Rekomendasi	Tujuan utama	Beberapa langkah utama
Rekomendasi1 Melanjutkan strategi kerja sama Grup AFD di Indonesia	Memanfaatkan pengalaman-pengalaman sukses AFD di Indonesia, sembari berupaya mengintegrasikan berbagai aktivitas baru apabila dianggap perlu dan memungkinkan bagi Grup AFD, dengan mempertimbangkan sumber daya serta mandat yang dimilikinya. Aktivitas baru ini dapat didasarkan pada PERMINTAAN yang disampaikan oleh mitra Indonesia atau hasil penelitian yang dilakukan oleh AFD.	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbarui dialog yang rutin dan dinamis dengan otoritas Indonesia (khususnya dengan pemerintahan baru yang terpilih pada tahun 2024). • Dewan penasihat AFD di Jakarta diaktifkan lebih lanjut (dengan memanfaatkan keahlian dan jejaring yang dimilikinya).

2.2 Efektivitas

2.2.1 – Pendanaan dari AFD telah berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi besar di Indonesia

Analisis ini menunjukkan beberapa poin penting berikut:

- **Aktivitas proyek sebagian besar telah berlangsung sesuai rencana**, meskipun ada beberapa kendala, terutama karena keterlambatan pelaksanaan (sebagian disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan perubahan prioritas dari pemerintah Indonesia).
- **Evaluasi proyek menyoroti kontribusinya terhadap reformasi penting dan akibatnya berdampak lebih luas terhadap kebijakan**

publik Indonesia melalui dialog jangka panjang mengenai isu-isu tersebut. Berikut beberapa proyek sebagai contohnya: pembiayaan anggaran untuk kebijakan publik di sektor logistik, pembiayaan anggaran untuk kebijakan publik yang mendukung reformasi perpajakan, pembiayaan anggaran untuk kebijakan publik dalam rangka memperkuat ketahanan sistem keuangan, dan sebagainya (Kotak 6).

- **Untuk sebagian besar proyek ini, evaluasi menunjukkan bahwa hasil-hasil yang dicapai berpotensi berkelanjutan** karena jaminan telah diambil dalam hal ini (komitmen dari para pemangku kepentingan Indonesia, aktivitas penguatan kapasitas, dan sebagainya).

Kotak 6 – Ilustrasi hasil yang terkait dengan dialog kebijakan publik jangka panjang

- Dalam hal pinjaman kebijakan publik untuk pengembangan rantai pasok logistik (Proyek Keandalan Rantai Pasok dan Kinerja Pelabuhan I dan II – CID1070 dan CID1072), evaluasi menyimpulkan bahwa hasil telah tercapai, meskipun kontribusi AFD relatif kecil dibandingkan dengan para donor lainnya. Dampak program terhadap penguatan kapasitas logistik maritim dinilai positif terhadap tiga pilar reformasi, meskipun kemajuan terhambat oleh sejumlah pembatasan yang masih berlaku, seperti keterbukaan yang terbatas bagi investor asing. Secara keseluruhan, peran serta ini memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian hasil-hasil sektoral yang ditargetkan: peran serta ini meningkatkan kualitas reformasi yang sedang dijalankan (tingkat ambisi, kejelasan tujuan), mendukung pelaksanaan reformasi, dan dengan demikian, berkontribusi pada percepatan kemajuan yang telah diamati.
- Evaluasi terhadap pinjaman kebijakan publik untuk reformasi perpajakan (DPL Fiscal) 1, 2 & 3 (CID1064, CID1071 & CID1088) yang diberikan oleh AFD selama periode 2015–2020 menunjukkan bahwa rangkaian pinjaman tersebut memungkinkan pemerintah untuk melanjutkan strategi pembiayaan utang, yaitu strategi kunci untuk mendanai reformasi yang mencakup pengurangan subsidi, perubahan sistem perpajakan, serta peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial. Dukungan dari AFD dan Expertise France turut berkontribusi pada pembentukan proses kelembagaan yang berkelanjutan: pinjaman AFD membantu memperkuat ruang gerak fiskal yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran negara dan upaya reformasinya.
- Evaluasi terhadap pembiayaan anggaran DREAM 2 (*Disaster Resilience Enhancement and Management Program*) menunjukkan bahwa semua indikator dalam matriks kebijakan publik telah tercapai atau sedang dalam proses pencapaian pada saat evaluasi akhir dilakukan. Hasil paling signifikan dari proyek ini adalah terjadinya dua kali lipat peningkatan anggaran untuk pengurangan risiko bencana antara tahun 2020 dan 2021.
- Laporan penyelesaian proyek mengenai ketahanan sistem keuangan (DPL Ketahanan Sistem Keuangan CID 1111) menunjukkan bahwa efektivitas proyek ini dinilai sangat memuaskan dan kontribusi AFD juga dianggap memuaskan, khususnya dalam hal posisi dialog kebijakan publik AFD di sektor ini, diskusi yang mendalam dengan para pemangku kepentingan (Otoritas Indonesia dan Bank Dunia), serta penguatan dialog terkait keuangan iklim melalui dukungan teknis dari OJK selaku regulator perbankan. Beberapa reformasi yang tercantum dalam matriks kebijakan publik telah berhasil dilaksanakan.

Sumber: laporan evaluasi proyek AFD

Semua hasil ini merupakan buah dari **keberhasilan mobilisasi berbagai pengaruh yang biasa digunakan oleh AFD di negara-negara mitranya**, yaitu: (i) kombinasi antara dialog kebijakan publik mengenai isu-isu tertentu, yang didukung oleh tingkat keahlian tinggi dari tim AFD dan penyedia bantuan teknis yang dipilih (termasuk Expertise France), (ii) daya tarik dukungan anggaran, dan (iii) mobilisasi tambahan hibah untuk pembiayaan bantuan teknis. Proyek-proyek penelitian juga dapat memberikan nilai tambah apabila dimanfaatkan untuk mendukung pemikiran dan strategi para mitra.

Namun, **kontribusi AFD terhadap pencapaian dan hasil ini tidak selalu bersifat menentukan dalam peluncuran maupun pelaksanaan proyek**. Evaluasi terhadap proyek-proyek menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya keuangan – termasuk untuk bantuan teknis – dibandingkan dengan para donor internasional lainnya, telah membatasi pengaruh AFD dalam dialog kebijakan publik dan proses negosiasi. Selain itu, pada awal keterlibatannya di Indonesia, AFD sering kali terlambat bergabung dalam meja perundingan ketika dialog sudah berjalan cukup jauh. Sebaliknya, strategi untuk “menjejaskan kaki secara bertahap”, kemudian memperkuat kehadiran dan pengaruhnya dalam dialog kebijakan publik terbukti efektif dan secara bertahap membawa hasil.

Tabel berikut menyajikan berbagai TPB yang tercantum dalam strategi peran serta AFD di Indonesia untuk periode 2017–2022, kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia, aktivitas yang dilakukan oleh Grup AFD terkait dengan perkembangan tersebut, serta unsur-unsur evaluasi dan prospek kerja sama antara Grup AFD dan Indonesia.

Tabel 4 – Kontribusi Grup AFD terhadap TPB yang disebutkan dalam strategi 2017–2021 dan/atau yang terkait dengan volume pembiayaan terbesar dari Grup AFD di Indonesia selama periode tersebut

TPB yang tercantum dalam strategi AFD tahun 2017 untuk Indonesia	Kemajuan Indonesia terhadap TPB ^[13]	Aktivitas Grup AFD yang berkontribusi terhadap kemajuan ini	Evaluasi dan prospek
	<ul style="list-style-type: none"> ● ➔ Penduduk yang memiliki akses terhadap listrik ● ↑ Penduduk yang memiliki akses terhadap energi bersih dan teknologi untuk memasak ● ➔ Emisi CO₂ dari energi fosil dalam bauran energi dibandingkan dengan total produksi listrik ● ➔ Porsi energi terbarukan dibandingkan dengan total produksi listrik 	<p>Aktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog sektoral di tingkat kementerian • Investasi yang berkontribusi pada akses energi yang lebih berkelanjutan dan adil • Pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor tersebut, dengan penekanan pada teknologi baru yang diperlukan untuk transisi energi • Dukungan teknis dan penguatan kapasitas para mitra <p>Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIEP (CID1061, CID1067) • FEXTE PLN tenaga angin (CID1119) • FAPS Masang II (CID1095) • PT SMI (CID1083, CID1085, CID1090) 	<p>Pengembangan energi terbarukan merupakan isu penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia: komitmen besar telah dibuat melalui penandatanganan perjanjian Jet-P (<i>Just Energy Transition Partnerships</i>). Sektor energi terbarukan dan efisiensi energi tetap menjadi bidang kerja sama yang diutamakan oleh Grup AFD, bersama dengan para pemangku kepentingan pembangunan internasional lainnya di Indonesia, serta dengan melibatkan sektor swasta (khususnya melalui kerja sama dengan Proparco).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● ↗ Gini coefficient ● ● Palma ratio 	<p>TPB 10 tentang pengurangan ketimpangan bukanlah sektor peran serta utama dalam strategi Grup AFD, namun dimasukkan secara lintas sektor dalam berbagai proyek (misalnya, proyek mengenai keadilan fiskal – CID1064, 1071, 1088, 1075 – atau mengenai ketahanan sektor keuangan – CID1111, CID1118).</p>	<p>Pengurangan ketimpangan merupakan prioritas utama bagi otoritas Indonesia. AFD, khususnya departemen risetnya, saat ini sedang melakukan kajian yang diharapkan dapat memungkinkan penanganan isu ketimpangan secara lebih baik dalam proyek-proyek baru.</p>

● TPB yang telah dicapai ● Masih terdapat tantangan ● Tantangan besar masih ada ● Tantangan utama masih ada ● Informasi tidak tersedia

↑ Dalam jalur yang tepat atau mempertahankan capaian ↗ Peningkatan ➔ Stagnasi ↓ Pengurangan ● ● Informasi tentang tren tidak tersedia

[13] SDG transformation center: Data diambil dari laporan pembangunan berkelanjutan 2023; pada saat publikasi ini diterbitkan, data yang tersedia dalam bahasa Inggris berasal dari: Sustainable Development Report 2024.

TPB yang tercantum dalam strategi AFD tahun 2017 untuk Indonesia	Kemajuan Indonesia terhadap TPB	Aktivitas Grup AFD yang berkontribusi terhadap kemajuan ini	Evaluasi dan prospek
 <p>11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ↗ Persentase penduduk yang tinggal di daerah kumuh ● → Konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 (partikulat halus dengan diameter < 2,5 mikron) ● → Akses terhadap sumber air yang telah ditingkatkan dan dialirkan melalui saluran (air perpipaan) ● ↑ Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 	<p>Aktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosi model pembangunan kota berkelanjutan (jenis kawasan ramah lingkungan) di tiga kota percontohan <p>Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • DREAM (CID1100, CID1122) • FEXTE banjir (CID1113) • FAPS IMP TPSP (CID1121) • FICOL LR Kandari (CID1089) 	<p>Proyek pembangunan kota berkelanjutan (jenis kawasan ramah lingkungan) di tiga kota percontohan tidak terlaksana selama periode yang dicakup oleh evaluasi, namun proyek-proyek yang lebih baru (di luar cakupan evaluasi) mulai mengangkat topik ini, yang tetap menjadi prioritas bagi pembangunan Indonesia.</p> <p>Pengingat: Penduduk perkotaan Indonesia meningkat dari 14% pada tahun 1960 menjadi 56% pada tahun 2020. Diperkirakan bahwa pada tahun 2045, lebih dari 70% penduduk akan tinggal di kota^[14] (sumber : Urbanshift, Bank Dunia, Indonesia UrbanShift (shiftcities.org)).</p>
 <p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ↑ Penangkapan ikan terhadap spesies yang dieksplorasi secara berlebihan atau terancam punah ● ↑ Penangkapan ikan dengan metode pukat harimau atau pengarukan ● → Penangkapan ikan yang tidak dimanfaatkan secara optimal (ikan terlalu kecil, tidak selektif terhadap sumber daya) ● ● Ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut yang berasal dari impor ● → Rata-rata luas wilayah laut atau pesisir yang dilindungi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi (<i>hotspot</i>) ● ↓ Indeks kesehatan laut: kebersihan air 	<p>Aktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian terkait keanekaragaman hayati laut • Penguatan kapasitas mitra Indonesia untuk lebih memahami dan melestarikan sumber daya alam <p>Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMKG Cuaca laut (CID1080, CID1086) • Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (CID1109, CID1104, CID1105) • KRisNA (CID1077, CID1079) • FEXTE IRD polusi plastik (CID1097) 	<p>Keterlibatan Grup AFD dalam isu kelautan dan pesisir di Indonesia mendapat dukungan dari kerangka kerja sama yang kondusif, yang tercermin antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog politik tingkat tinggi antara Prancis dan Indonesia serta adanya kemitraan. • Pendekatan bertahap yang menggabungkan bantuan teknis untuk membantu para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mempersiapkan proyek-proyek yang didanai oleh AFD serta proyek-proyek percontohan. Sebagai contoh, proyek <i>Ecofishing Ports</i> (CID1109) bertujuan untuk menguji pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan, dengan harapan dapat diterapkan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia lainnya di masa depan. • Hubungan jangka panjang antara AFD dan Indonesia dalam sektor ini.

[14] Indonesia | UrbanShift (shiftcities.org) : Inisiatif yang dilaksanakan di 9 negara untuk memastikan pembangunan perkotaan yang rendah emisi karbon.

TPB yang tercantum dalam strategi AFD tahun 2017 untuk Indonesia	Kemajuan Indonesia terhadap TPB	Aktivitas Grup AFD yang berkontribusi terhadap kemajuan ini	Evaluasi dan prospek
 <p>15 EKOSISTEM DARATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● → Rata-rata luas wilayah daratan yang dilindungi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi (<i>hotspot</i>) ● → Rata-rata luas wilayah air tawar yang dilindungi di kawasan kritis keanekaragaman hayati ● ↓ Daftar merah spesies yang terancam punah ● ↗ Indikator deforestasi permanen ● ● Deforestasi atau hilangnya air tawar yang diimpor 	<p>Aktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • kapasitas mitra Indonesia untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan melestarikan sumber daya alam dengan lebih baik. • Promosi standar-standar baru dan pengembangan kemitraan inovatif untuk konservasi sumber daya hutan serta inklusi penduduk lokal. • Dukungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prancis yang terlibat dalam konservasi sumber daya hutan dan inklusi penduduk lokal. <p>Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim (CID1062) 	<p>TPB 15 merupakan isu kunci bagi pembangunan Indonesia dan strategi peran serta AFD. Namun, isu kehutanan masih menjadi bidang yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat kerja sama.</p>
 <p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELANGGANAN YANG TANGGUH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Pembunuhan ● ↑ Penahanan sewenang-wenang ● ↑ Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian pada malam hari di sekitar tempat tinggalnya ● ● Pencatatan akta kelahiran pada otoritas yang berwenang ● ↓ Indikator persepsi korupsi ● ● Pekerja anak ● ● Volume ekspor senjata konvensional ● ↓ Kebebasan pers ● ↓ Akses dan ketersediaan otoritas keadilan ● ↓ Jangka waktu prosedur administratif ● ↗ Persentase pembebasan lahan yang diberi kompensasi secara layak 	<p>Aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keuangan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan terhadap reformasi keuangan publik • Bantuan teknis di bidang kebijakan fiskal <p>Proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi perpajakan (CID1064, CID1071, CID1088, CID1075) • Ketahanan sektor keuangan (CID1111, CID1118) • FAPS OJK keuangan hijau (CID1106) 	<p>Aktivitas AFD yang terkait dengan TPB 16 berfokus pada keuangan publik dan keuangan hijau.</p> <p>Sektor kerja sama ini telah mendapatkan manfaat dari beberapa proyek yang evaluasi akhirnya menyoroti kontribusi mereka terhadap reformasi besar di tingkat nasional serta penguatan kompetensi mitra lokal.</p>

2.2.2 – Kemajuan yang sangat signifikan dalam pencapaian TPB di Indonesia patut dicatat, dengan kontribusi yang bersifat kualitatif dan terarah dari Grup AFD.

Perlu digarisbawahi bahwa **Indonesia telah mencapai kemajuan keseluruhan yang sangat besar dalam jalur pembangunannya, yang semakin sejalan dengan TPB**. Laporan TPB tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-75 di dunia, yang

menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 saat berada di peringkat ke-102. Kemajuan terbesar tercatat pada TPB yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, serta air dan sanitasi (Skema 2). Sementara itu, kemajuan yang lebih terbatas terlihat pada TPB yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu TPB 7 tentang energi, TPB 14 tentang lingkungan laut, dan TPB 15 tentang ekosistem daratan.

Skema 2 – Dasbor TPB di Indonesia^[15]



Indonesia merupakan negara yang tidak terlalu bergantung pada bantuan asing, sebagaimana ditunjukkan oleh angka-angka di bawah ini (kotak 7). Dalam hal ini, jumlah Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), termasuk kontribusi keuangan dari Grup AFD, hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap jalur pembangunan Indonesia.

Kotak 7 – Angka utama investasi nasional dan asing untuk pembangunan Indonesia

- Produk Domestik Bruto (dalam dolar AS saat ini): 1,06 triliun dolar (2020)
- Pembentukan Modal Tetap Bruto: 32% dari PDB (2020) atau 335,82 miliar dolar (2020)
- Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah: 109,69 miliar dolar (2020)
- Investasi asing langsung, arus masuk bersih: 1,8% dari PDB (2020) atau 19,18 miliar dolar (2020)
- Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan arus bersih lainnya yang diterima: 1,21 miliar dolar AS 0,7% dari pengeluaran pemerintah pusat (2020)
- Komitmen AFD: 322 juta dolar (2020)

Sumber: Dokumen AFD dan OECD^[16]

[15] SDG transformation center : Data diambil dari laporan pembangunan berkelanjutan 2023; pada saat publikasi ini diterbitkan, data yang tersedia dalam bahasa Inggris berasal dari Sustainable Development Report 2024.

[16] OECD Data Explorer • Official Development Finance (ODF) by country and region.

Dalam konteks ini, kontribusi Grup AFD terhadap jalur pencapaian TPB Indonesia bersifat kualitatif dan terarah. Kontribusi ini bertumpu pada pengaruh tradisional milik Grup AFD. Namun, terdapat dua poin penting terkait TPB yang perlu dicatat:

- Poin pertama adalah kemitraan istimewa dengan PT SMI yang mendorong terjadinya dialog yang mendalam, khususnya mengenai TPB. Kemitraan ini mencerminkan salah satu ambisi dari peta jalan TPB AFD yang diterbitkan pada tahun 2021, yakni mendukung “transformasi para pemangku kepentingan nasional” sebagai salah satu pengungkit utama kiprahnya dalam mendukung TPB di berbagai negara.
- Peran serta dalam bentuk hibah dianggap sangat penting untuk mendorong ambisi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan TPB. Penyediaan bantuan teknis, yang sering kali diakui berkualitas tinggi oleh para mitra, memungkinkan untuk memulai bidang kerja sama baru dan bekerja bersama-sama pada tingkat ambisi yang lebih tinggi.

Pada tingkat proyek, penerapan nyata terhadap TPB dapat dilakukan melalui:

- Pelaksanaan berbagai aktivitas khusus, seperti penerapan bonus TPB untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat dalam skema kredit ke PT SMI setelah dilakukan identifikasi atas dampak positif yang diharapkan atau melalui keterlibatan dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan dalam kerangka proyek *Ecofishing ports*^[17]
- Proyek-proyek bantuan teknis yang memungkinkan penguatan isu gender khususnya (FAPS Dream 2 dan bantuan teknis AIF PT SMI tentang gender yang didanai oleh danadelegasi dari Uni Eropa). Namun demikian, analisis ini menyoroti adanya “mata rantai yang hilang” antara ambisi global *ex ante* proyek-proyek dalam hal TPB dan perumusan aktivitas konkret untuk mewujudkannya, yang terkadang membatasi pelaksanaan nyata dari niat AFD.

[17] Komitmen khusus terhadap peningkatan kualitas data mengenai hasil tangkapan dan keterlacakkan, bangunan hemat energi, serta infrastruktur cerdas pada Rencana Aksi Iklim.

Tabel 5 – Kesesuaian antara tujuan prioritas AFD dan pilar-pilar strategi pembangunan Indonesia

	SM	M	TM	STM		Ruang gerak grup AFD
Efektivitas keterlibatan					Evaluasi proyek menyoroti kontribusi proyek yang didukung oleh AFD terhadap reformasi besar di Indonesia, meskipun kontribusi AFD terhadap pencapaian dan hasil tersebut tidak selalu bersifat menentukan, baik dalam memulai maupun memastikan pelaksanaannya.	++
Dampak terhadap TPB (1)					Kemajuan signifikan telah dicapai dalam jalur pembangunan berkelanjutan Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam laporan terbaru pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal kemiskinan, pendidikan, air, dan sanitasi.	+
Dampak terhadap TPB (2)					Kontribusi operasi Grup AFD terhadap kemajuan ini bersifat kualitatif dan terarah; kontribusi ini memanfaatkan strategi pengaruh umum Grup AFD: dialog kebijakan publik yang mengkombinasikan pinjaman dan bantuan teknis, kemitraan istimewa dengan beberapa pemangku kepentingan utama pembangunan di Indonesia, dan sebagainya.	++
Integrasi penuh TPB dalam implementasi dan dampak proyek					Beberapa proyek secara efektif telah mempertimbangkan TPB dalam pelaksanaan mereka, namun terkadang tampaknya terdapat mata rantai yang hilang antara analisis TPB yang dilakukan saat penilaian awal dan pelaksanaan aktivitas terkait.	+++

Keterangan: SM Sangat memuaskan, M Memuaskan, TM Tidak memuaskan, STM Sangat tidak memuaskan

++ Ruang gerak besar, ++ tanggung jawab bersama, + ruang gerak terbatas

Rekomendasi	Tujuan utama	Beberapa langkah utama
Rekomendasi 2 Memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan nasional, di luar kementerian dan lembaga mitra proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan utama pembangunan di Indonesia agar mereka dapat berkontribusi, di luar operasi yang dibiayai bersama, terhadap penyalarasan praktik dan pendanaan mereka dengan TPB • Memperdalam dialog dengan beberapa mitra dan mencoba mengembangkan kemitraan baru • Meningkatkan visibilitas AFD mengenai TPB di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pengembangan kemitraan istimewa dengan PT SMI, dengan fokus pada aktivitas yang memberikan efek pengganda terhadap TPB. • Mendampingi Kementerian Perencanaan dalam strategi transformasi para pemangku kepentingan Indonesia untuk mendukung pencapaian TPB dengan memobilisasi sumber daya non-finansial AFD (pertukaran antar mitra sejawat, inovasi lintas sektor, studi lintasan pembangunan yang melibatkan penelitian, dialog strategis tingkat tinggi). • Mengevaluasi kemungkinan pengembangan kemitraan baru
Rekomendasi 3 Mobilisasi seluruh instrumen peran serta AFD (finansial dan non-finansial) untuk mendukung pembangunan Indonesia	Mendukung dialog kebijakan publik dengan mitra Indonesia dalam isu-isu utama, dengan memobilisasi seluruh instrumen yang tersedia di AFD (baik finansial maupun non-finansial)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan komponen hibah/mobilisasi sumber daya hibah dari Eropa untuk membiayai bantuan teknis yang mendukung pinjaman pemerintah kepada mitra. Hal ini memungkinkan peningkatan dialog dengan mitra dan peningkatan tingkat ambisi (terutama dalam aspek TPB) • Mengembangkan pinjaman non-pemerintah yang memungkinkan AFD menjangkau jenis pemangku kepentingan lain dan berperan serta di tingkat lain dari kebijakan publik
Rekomendasi 4 Memastikan pemahaman bersama terhadap Agenda 2030 dan memperkuat integrasi yang efektif dan sistematis dari TPB dalam kiprah AFD	Berlilah dari ambisi umum untuk mendukung pencapaian TPB ke penerapannya secara efektif dan sistematis dalam strategi negara AFD dan di semua tahapan proyek.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal strategi, memperkuat pendekatan holistik terhadap TPB dan menekankan prinsip-prinsip TPB (interkoneksi TPB, <i>Do no Harm</i>, pelaksanaan proyek transformatif, fokus pada kelompok paling rentan) agar lebih terimplementasi dalam operasi yang dibiayai. • Melanjutkan/memperkuat upaya pelatihan mengenai TPB untuk semua tim di dalam Grup AFD. • Mengembangkan alat untuk memfasilitasi pengintegrasian TPB secara efektif dalam pelaksanaan proyek • Dalam evaluasi tingkat negara (jika relevan), mengisi matriks evaluasi kontribusi Grup AFD terhadap TPB (lihat Lampiran B)

2.3 Koherensi

2.3.1 – Koordinasi antara tiga entitas dalam Grup AFD masih dalam tahap pembangunan selama periode evaluasi: terdapat sinergi yang sudah ada dan dapat diperkuat.

Selama periode evaluasi, **konsep «Grup AFD» masih dalam tahap awal di Indonesia**, dengan sedikit peluang kolaborasi antara ketiga entitas (AFD, Expertise France, dan Proparco) dalam peran serta untuk mendukung TPB. Meskipun Proparco memiliki kantor di Jakarta selama periode evaluasi ini, kurangnya peluang membuat sinergi antar entitas di tingkat Grup AFD belum terwujud pada saat itu. Sementara itu, Expertise France baru saja bergabung ke dalam Grup AFD.

Sinergi dalam Grup ini dinilai relevan: diskusi rutin berlangsung antara tim dari ketiga entitas untuk saling bertukar informasi mengenai konteks Indonesia dan peluang kolaborasi. Contohnya, dalam sektor energi, transportasi, dan keuangan publik. Evaluasi ini menyoroti beberapa contoh koordinasi yang relevan, seperti bantuan teknis dari Expertise France yang diterapkan pada pembiayaan anggaran kebijakan publik yang dibiayai oleh AFD. Operasi semacam ini telah membantu membentuk “Tim Prancis” yang terdiri dari AFD, Expertise France, dan bahkan di luar Kementerian Keuangan Prancis, menjadikan “Tim Prancis” sebagai pemangku kepentingan pembangunan tersendiri.

2.3.2 – Keterlibatan yang bertumpu pada sektor swasta untuk TPB menghadapi konteks yang sulit

Peran serta Grup AFD dalam mendukung sektor swasta dilakukan baik secara tidak langsung (oleh AFD) maupun langsung (oleh Proparco): operasi AFD yang menargetkan kondisi struktural untuk liberalisasi pasar Indonesia, seperti pinjaman yang mendukung reformasi perpajakan dan ketahanan sistem keuangan, konsisten dengan potensi penguatan operasi Proparco di negara ini. Aksi gabungan antara AFD dan Proparco ini dapat membantu tercapainya TPB, karena memobilisasi sektor swasta diperlukan untuk mengisi kesenjangan pembiayaan untuk membantu mencapai Agenda 2030.

Namun, saat Proparco mencoba memperluas keterlibatannya di Indonesia, **iklim usaha tetap kompleks dan kurang kondusif untuk mobilisasi sektor swasta**: sehingga ambisi Proparco harus dikurangi. Volume peran serta yang secara langsung menargetkan sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan relatif terbatas selama periode evaluasi. Walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi swasta, perubahan struktural mendalam masih diperlukan.

Selain itu, terbatasnya instrumen keuangan yang tersedia untuk negara berkembang besar dengan pendapatan menengah-atas, seperti Indonesia, mempengaruhi kemampuan Proparco dalam mencapai tujuannya. Selama periode evaluasi, Proparco tidak dapat terlibat dalam pembiayaan dengan instrumen campuran (seperti pembiayaan konsesional, *blending*) di Indonesia, berbeda dengan lembaga keuangan pembangunan multilateral, yang membatasi kemampuannya menarik modal swasta sebagai pelengkap pembiayaan publik, guna mengoptimalkan efektivitas dan dampak investasi.

Koordinasi dengan mitra teknis dan keuangan di Indonesia merupakan kekuatan utama dari peran serta Grup AFD di negara ini. Selama periode evaluasi, AFD mampu berkoordinasi dengan donor internasional utama untuk (i) mengidentifikasi proyek yang membutuhkan pembiayaan bersama, (ii) meningkatkan dampak potensial proyek, dan (iii) menghindari duplikasi, terutama di bidang prioritas pemerintah Indonesia seperti transisi energi, konservasi laut, dan ketahanan keuangan publik.

AFD berhasil masuk ke dalam siklus negosiasi dengan pemerintah Indonesia. AFD diundang untuk ikut serta dalam pembiayaan bersama program-program anggaran bersama Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Namun, karena keterlibatannya yang masih baru, AFD menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan ekspektasi dan ambisinya terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam proyek-proyek yang dievaluasi. Terlepas

dari itu, ambisi AFD yang tinggi dalam hal TPB mungkin memberikan dampak positif bagi para mitranya (donor lain, pemerintah Indonesia, dll.). Namun penyelarasan AFD terhadap standar sosial dan lingkungan Bank Dunia dianggap terlalu ambisius dalam konteks prioritas pembangunan Indonesia.

Evaluasi ini juga mencakup analisis komparatif mengenai bagaimana empat donor (JICA, KfW, ADB, dan WB) memperhitungkan TPB dalam strategi mereka masing-masing. Dari analisis ini, diketahui bahwa setiap institusi memiliki alat untuk menganalisis aspek keberlanjutan

dalam proyek. Namun demikian, pendekatan holistik yang diperlukan untuk integrasi TPB secara efektif, termasuk isu keterkaitan dan potensi konflik/sinergi antar TPB, tampaknya belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh donor. Tingkat ambisi terhadap isu ini pun bervariasi.

Tabel 6 – Penilaian evaluasi terhadap pencapaian kriteria koherensi dan rekomendasi

	SM	M	TM	STM		Ruang gerak grup AFD
Koordinasi antar tiga entitas dalam Grup AFD					Selama periode evaluasi, dimensi Grup AFD masih dalam tahap awal, dengan sedikit kesempatan untuk berkolaborasi di antara ketiga entitas tersebut.	+++
Koordinasi dengan mitra pembangunan internasional					AFD berhasil berkoordinasi dengan donor internasional utama untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan bersama dan memperkuat dampak potensialnya. Namun, terkadang mengalami kesulitan untuk memposisikan diri dan memperjuangkan standar serta prioritasnya karena masih baru di meja negosiasi.	++
Mobilisasi sektor swasta					Grup AFD berusaha mendorong mobilisasi sektor swasta secara tidak langsung (melalui AFD) dan langsung (melalui Proparco), namun konteks Indonesia masih menjadi lingkungan yang sulit untuk mobilisasi tersebut.	+

Keterangan: SM Sangat memuaskan, M Memuaskan, TM Tidak memuaskan, STM Sangat tidak memuaskan

+++ Ruang gerak besar, ++ tanggung jawab bersama, + ruang gerak terbatas

Rekomendasi	Tujuan utama	Beberapa langkah utama
Rekomendasi 5 Memperkuat dimensi "Grup AFD" di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan nilai tambah dari masing-masing entitas grup, khususnya dalam hal pemahaman terhadap kerangka regulasi yang ada • Mengembangkan peluang pertukaran dan sinergi antar entitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengonsolidasikan dan membagikan informasi sektoral yang dikumpulkan oleh masing-masing entitas di tiga sektor prioritas sinergi (transisi energi, keuangan hijau, modal alam/ekonomi biru) dan sektor lainnya jika memungkinkan • Menggerakkan pemangku kepentingan lain dari Tim Prancis (Kedutaan, Bagian Kerja Sama dan Kebudayaan, dan Bagian Ekonomi) untuk memberikan dukungan
Rekomendasi 6 Melanjutkan kerja sama dengan mitra pembangunan internasional di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan strategi mobilisasi AFD, memperkuat dampak proyek-proyek AFD di sektor-sektor pembangunan utama Indonesia • Meningkatkan eksistensi AFD di hadapan otoritas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga koordinasi yang baik antar donor internasional, pertukaran praktik baik, berbagi pengetahuan, dll; Menerapkan perjanjian kerja sama strategis di Indonesia yang telah ditandatangani antara Bank Dunia dan AFD; memperkuat kerja sama dengan Uni Eropa • Dalam hal isu-isu spesifik terkait TPB, lebih mengintegrasikannya dalam negosiasi proyek dengan mitra internasional (khususnya keterkaitan antar TPB)
Rekomendasi 7 Mendorong pergerakan sektor swasta untuk mendukung TPB	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan inisiatif dukungan langsung dan tidak langsung kepada sektor swasta • Memastikan bahwa TPB secara sistematis dan efektif terintegrasi dalam proyek-proyek dukungan sektor swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk AFD: mendukung kondisi pengembangan sektor swasta di Indonesia dan melanjutkan/mengembangkan aktivitas yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kondisi struktural bagi perkembangan sektor swasta (dukungan terhadap reformasi fiskal, sistem keuangan, kerangka hukum, dll.) • Untuk Proparco: menggerakkan mitra teknis dan keuangan internasional terkait isu sektor swasta untuk mendukung pengembangan portofolio peran sertanya

3. Kesimpulan

Untuk mengevaluasi kontribusi Grup AFD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia selama periode 2015–2022, pertama-tama diperlukan analisis mendalam terhadap **strategi dan peran serta Grup** di negara tersebut.

Evaluasi ini menunjukkan adanya keselarasan strategis antara inisiatif yang didukung oleh Grup AFD dan strategi nasional untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. Mengingat Grup AFD hanya berperan serta atas permintaan otoritas, proyek-proyek yang didanai merupakan buah dari dialog mendalam antara mitra Indonesia dan Prancis. Operasi Grup AFD mencerminkan pencarian **keseimbangan antara aspirasi Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, serta mandat AFD terkait pertumbuhan hijau dan mitigasi perubahan iklim.**

Semua keterlibatan tersebut membawa hasil yang menarik: **berhasil mendorong dialog kebijakan mengenai isu-isu utama seperti energi dan berkontribusi pada adopsi reformasi penting seperti reformasi perpajakan.**

Hasil ini merupakan buah dari **pemanfaatan berbagai alat dan pengaruh khas Grup AFD**, yang menggabungkan dialog kebijakan publik, bantuan teknis, serta pembiayaan anggaran dan proyek. Analisis mendalam terhadap penggunaan bantuan teknis dalam proyek menunjukkan bahwa alat ini sangat relevan untuk membantu mitra dalam merumuskan ambisi dan rencana aksi mereka, serta untuk memperkuat kapasitas lembaga dan para pemangku kepentingan terkait.

Kendati demikian, **kontribusi Grup AFD terhadap berbagai hasil tersebut tidak selalu menentukan**, karena i) Grup AFD

merupakan pemangku kepentingan yang relatif baru di Indonesia (dan selama periode evaluasi, terkadang bergabung terlambat dalam proses negosiasi dengan mitra Indonesia dan donor internasional), dan ii) volume pembiayaan yang dialokasikan oleh Grup AFD di Indonesia, meskipun signifikan bagi AFD, tetapi tergolong kecil dalam konteks negara berkembang besar yang tidak terlalu bergantung pada ODA. Namun, **Grup AFD mampu memanfaatkan koordinasi yang baik dengan mitra teknis dan keuangan internasional untuk terkadang dengan cepat terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia, dan dalam kasus-kasus tersebut, mampu mendorong ambisi besar dalam isu-isu lingkungan.**

Terkait TPB, evaluasi ini mencatat bahwa strategi AFD yang tercakup dalam periode evaluasi (2017–2021) menyebutkan TPB di setiap sektor peran serta dan tidak secara lintas sektoral. **Selain itu, selama periode ini, tidak ada analisis khusus mengenai lintasan TPB di Indonesia**, atau analisis mengenai kesenjangan antara lintasan pembangunan Indonesia saat ini dan yang diperlukan untuk mencapai TPB. **Ditingkat proyek**, evaluasi mencatat bahwa TPB merupakan acuan yang kuat. Memang, TPB sering kali diintegrasikan ke dalam keseluruhan ambisi sejak tahap penilaian proyek dan seterusnya. Alat-alat yang **digunakan selama fase penilaian proyek** memungkinkan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memperhitungkan dampak lingkungan dari tujuan sosial, dan sebaliknya. Analisis proyek juga menunjukkan bahwa ambisi TPB ini telah diperhitungkan secara lebih luas sejak tahun 2021. Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa ambisi ini tidak diterjemahkan secara sistematis ke dalam tindakan dan indikator proyek, yang tidak menjamin implementasi yang efektif. Nilai tambah dari TPB, serta bagaimana Agenda 2030 seharusnya memperkaya definisi strategi dan proyek kerja sama, tampaknya masih belum cukup terintegrasi secara internal di AFD, karena TPB masih menjadi acuan sektoral.

Dalam hal ini, evaluasi ini menekankan bahwa alat dan pengaruh tradisional dari Grup AFD terbukti relevan dan efektif, khususnya: i) pembentukan kemitraan jangka panjang, seperti dalam kasus dengan PT SMI, yang didukung oleh berbagai proyek pelengkap termasuk dialog mengenai kebijakan publik, pembiayaan proyek, dan bantuan teknis, serta ii) hibah, khususnya untuk bantuan teknis, yang memungkinkan dialog yang lebih ambisius mengenai tujuan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Lampiran A

Daftar proyek yang termasuk dalam ruang lingkup evaluasi

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
Program FB-PP untuk energi berkelanjutan dan inklusif I	CID1061	AFD	Ya	01/10/2015	Pinjaman pemerintah - €100 juta	<p>Tujuan dari SIEP adalah untuk mendukung transisi Indonesia menuju energi yang berkelanjutan, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga meningkatkan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.</p> <p>Tujuan khusus program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola sektor energi; • Mendorong keterlibatan sektor swasta yang lebih besar; • Meningkatkan akses terhadap energi yang berkelanjutan dan andal, serta efisiensi energi dalam perekonomian Indonesia. 	Selesai
Perubahan iklim	CID1062	AFD	N/A	27/01/2016	Subsidi - €350.000 juta	Proyek ini bertujuan untuk berkontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampak tersebut dengan memberdayakan komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam.	Selesai
FB-PP reformasi fiskal I	CID1064	AFD	Ya	08/11/2016	Pinjaman pemerintah - €100 juta	Tujuan dari pinjaman kebijakan publik ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan produktivitas dengan mendukung otoritas Indonesia dalam upaya memperbaiki kinerja sektor maritim dan logistik, memperjelas organisasi kelembagaan mereka, serta meningkatkan kepercayaan dan investasi dari operator swasta.	Selesai
Program FB-PP untuk energi berkelanjutan dan inklusif II	CID1067	AFD	Ya	17/11/2017	Pinjaman pemerintah - €100 juta	<p>Tujuan dari SIEP adalah mendukung transisi Indonesia menuju energi yang berkelanjutan, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga meningkatkan akses energi untuk seluruh warga negara Indonesia.</p> <p>Tujuan khusus program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola sektor energi; • Mendorong keterlibatan sektor swasta yang lebih besar; • Meningkatkan akses terhadap energi yang berkelanjutan dan andal, serta efisiensi energi dalam perekonomian Indonesia. 	Selesai

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
FB-PP Keandalan rantai pasokan dan kinerja pelabuhan I	CID1070		Ya	29/03/2017	Pinjaman pemerintah - €150 juta	Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan ekonomi maritim dengan menurunkan biaya transportasi dan harga akhir barang dan jasa, termasuk di wilayah terpencil, guna mendukung integrasi dan pembangunan daerah tersebut.	Selesai
FB-PP reformasi fiskal II	CID1071	AFD	Ya	13/10/2018	Pinjaman pemerintah - €150 juta	Tujuan dari pinjaman kebijakan publik yang diusulkan adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan produktivitas dengan membantu otoritas Indonesia dalam upaya mereka untuk meningkatkan kinerja sektor maritim dan logistik, memperjelas organisasi kelembagaan mereka, serta meningkatkan kepercayaan dan investasi dari pelaku usaha swasta.	Selesai
FB-PP keandalan rantai pasokan dan kinerja pelabuhan II	CID1072	AFD	Ya	28/11/2018	Pinjaman pemerintah - €150 juta	Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan ekonomi maritim dengan menurunkan biaya transportasi dan harga akhir barang dan jasa, termasuk di wilayah terpencil, guna mendukung integrasi dan pembangunan daerah tersebut.	Selesai
Kerja sama teknis dalam manajemen pelabuhan	CID1073	AFD	N/A	19/06/2018	Subsidi - €400.000	Tujuan dari program bantuan teknis yang diusulkan adalah untuk membantu para pemangku kepentingan pelabuhan publik Indonesia dalam meningkatkan model tata kelola mereka serta kebijakan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan, dengan merujuk pada pengalaman Prancis dan reformasi sektor yang sedang berlangsung yang didukung oleh para donor.	Selesai
FEXTE Reformasi fiskal	CID1075	AFD	N/A	15/06/2018	Subsidi - €900.000	Program bantuan teknis yang berfokus pada area utama sebagai berikut: a. R1 - Memperkuat Kementerian Keuangan RI dalam hal ekonomi digital (strategi pajak transaksi daring) dan perubahan iklim (label anggaran iklim, pajak lingkungan); b. R2 - Memperkuat administrasi pajak Indonesia dalam menilai dampak pengeluaran pajak terhadap ekonomi nasional, pengembangan pajak tidak langsung (cukai, PPN), dan analisis sektor informal untuk membantu	Selesai

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
						<p>memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kekhasan nasional;</p> <p>c. R3 - Mengonsolidasikan administrasi dalam strategi manajemen perubahannya dan dalam strategi pertukaran informasi antar lembaga pemerintahan;</p> <p>d. R4 - Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan anggaran dan fiskal Indonesia memperkuat analisis mereka terhadap isu-isu perpajakan internasional, khususnya terkait program BEPS (Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba) dan AEOI (Pertukaran Informasi Otomatis), sejalan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh OECD.</p>	
KRisNA-proyek penguatan kapasitas penelitian oseanografi Indonesia	CID1077	AFD	Ya	08/06/2021	Pinjaman pemerintah - €107,95 juta	<p>Proyek ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan kapasitas penelitian oseanografi bagi institusi publik Indonesia, terutama BRIN. Dampak yang diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya laut Indonesia; • Peningkatan pengukuran dampak polusi laut terhadap ekosistem pesisir dan laut; • Peningkatan pemantauan dampak perubahan iklim terhadap laut; • Peningkatan kualitas dan kinerja penelitian oseanografi, berkontribusi pada kemajuan penelitian ilmiah Indonesia secara nasional dan internasional; • Pengembangan sinergi dengan semua institusi oseanografi yang ada di Indonesia, serta tata kelola yang lebih baik terhadap aktivitas penelitian oseanografi. 	Sedang berjalan
Bantuan teknis untuk persiapan proyek KRisNA	CID1079	AFD	N/A	22/11/2018	Subsidi - €400.000	Dukungan dalam kerangka FEXTE ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Komponen «Studi Kelayakan» • Komponen «Refleksi tentang Tata Kelola Armada Publik dan Pertukaran Pengalaman» • Komponen penguatan kapasitas BRIN 	Sedang berjalan
BMKG Meteorologi kelautan	CID1080	AFD	Ya	19/12/2019	Pinjaman pemerintah - €7,1 juta	Tujuan utama dari proyek penguatan sistem meteorologi kelautan, yang merupakan bagian dari program yang lebih luas yang dikembangkan oleh BMKG, adalah untuk mengembangkan sistem informasi	Sedang berjalan

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
						<p>meteorologi kelautan yang terintegrasi di Indonesia. Tujuan khusus dari proyek ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan pengamatan laut yang mencakup seluruh perairan Indonesia; • Pengembangan layanan prakiraan dan peringatan yang andal dan terintegrasi, yang dapat diakses oleh pengguna di wilayah maritim dan pesisir, serta masyarakat umum; • Produksi alat dan pengetahuan terkait meteorologi dan studi iklim; • Pengembangan kapasitas operasional dan kerja sama internasional BMKG. 	
Lini Kredit ke PT SMI II	CID1083	AFD	Ya	20/05/2020	Pinjaman non pemerintah - 150 juta dolar	Tujuan dari lini kredit ini adalah untuk memperkuat penawaran pembiayaan PT SMI dalam mendukung proyek-proyek energi terbarukan, air dan sanitasi, transportasi umum, serta investasi lain yang berkaitan dengan iklim dan TPB.	Sedang berjalan
Bantuan Teknis untuk PT SMI	CID1085	AFD	N/A	20/05/2020	Subsidi - €600.000	Hibah ini bertujuan untuk membantu mendanai program bantuan teknis guna memperkuat kapasitas PT SMI, mendukung identifikasi dan analisis proyek, serta mendukung transformasinya secara bertahap menjadi bank pembangunan universal.	Sedang berjalan
Bantuan Teknis BMKG	CID1086	AFD	N/A	29/11/2019	Subsidi - €1,2 juta	FAPS mendanai bantuan teknis untuk mendukung pelaksanaan proyek Sistem Meteorologi Kelautan (MMS – CID1080, pinjaman pemerintah €71,1 juta).	Sedang berjalan
FB-PP Reformasi Fiskal III	CID1088	AFD	Ya	14/01/2020	Pinjaman pemerintah - €100 juta	<p>Program ini bertujuan untuk mendukung reformasi fiskal dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk tujuan ini, rangkaian program yang didukung oleh operasi ini disusun berdasarkan tiga pilar utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Meningkatkan efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran ii. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kapasitas pengawasan fiskal pemerintah iii. Meningkatkan tingkat potensi fiskal dan efektivitas kebijakan fiskal 	Sedang berjalan

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
FICOL (Fasilitas Pembiayaan untuk Pemerintah Daerah) LR Kendari	CID1089	AFD	N/A	27/01/2021	Grant – €570,100	Proyek ini diajukan dalam kerangka panggilan ide FICOL 2018 dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kota Kendari di bidang air dan sanitasi, melalui aktivitas yang berkaitan dengan siklus air (air bersih, air permukaan, riset ilmiah terhadap perairan di teluk). Proyek ini bertujuan memperkenalkan solusi manajemen baru untuk layanan air dan sanitasi kota di Indonesia. Dilaksanakan oleh Komunitas Aglomerasi La Rochelle, bekerja sama dengan Universitas La Rochelle dan Union des Marais de la Charente Maritime.	Sedang berjalan
Bantuan teknis untuk PT SMI	CID1090	AFD	N/A	02/12/2020	Subsidi dari dana delegasi Uni Eropa – €5 juta	Tujuan proyek ini adalah untuk memfasilitasi pembiayaan oleh PT SMI dan/atau lembaga keuangan Indonesia lainnya terhadap proyek infrastruktur yang memberikan manfaat nyata dalam hal iklim dan TPB, dengan fokus pada proyek-proyek kecil energi terbarukan.	Sedang berjalan
Proyek Palu pasca-tsunami	CID1092	AFD	Ya	07/05/2019	Subsidi – €1 juta	Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir yang tinggal di Teluk Palu. Tujuannya meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Memperkuat komunitas pesisir dan memulihkan sistem ekonomi mereka;• Mempromosikan dan menerapkan pendekatan baru pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis pengetahuan tradisional masyarakat;• Mempengaruhi pemangku kepentingan lain (media, pemerintah, dan LSM lainnya) mengenai tujuan dan praktik program.	Selesai
Konsultansi proyek pembangkit listrik tenaga air di Masang	CID1095	AFD	N/A	18/06/2021	Subsidi – €1,2 juta	Hibah ini bertujuan untuk membayai studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga air PLN di Sumatra Barat.	Sedang berjalan
Keahlian teknis (IRD/CLS) tentang polusi laut	CID1097	AFD	N/A	04/03/2020	Subsidi – €500.000	Proyek ini bertujuan memperkuat lembaga-lembaga Indonesia dalam hal pengetahuan, pencegahan, dan kesadaran terhadap polusi laut oleh plastik, dengan mendukung pemantauan dan pemodelan sampah laut. Proyek ini mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik, serta	Sedang berjalan

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
						statusnya sebagai pemimpin dalam APEC (<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>), di mana mereka memimpin dalam memerangi polusi laut.	
Program ketahanan bencana - FBPP DREAM 2	CID1100	AFD	Ya	28/07/2021	Pinjaman pemerintah - €100 juta	Tujuan dari program ini adalah untuk membantu Republik Indonesia dalam upaya memperkuat ketangguhannya terhadap bencana alam. Proyek ini mencakup dukungan anggaran, dialog kebijakan berdasarkan matriks indikator dan kerja sama teknis dalam pengurangan risiko bencana. Tujuannya ada empat: (i) memperkuat tata kelola pengurangan risiko bencana, (ii) meningkatkan pengetahuan tentang risiko, (iii) mendorong investasi dalam ketangguhan, dan (iv) mengintegrasikan ketangguhan ke dalam rekonstruksi daerah yang dilanda bencana.	Selesai
Bantuan teknis dalam mempersiapkan proyek Ports Ecoports	CID1104	AFD	N/A	05/06/2020	Subsidi - €400.000	FAPS ini bertujuan untuk membiayai aktivitas berikut: • kunjungan studi selama satu minggu oleh KKP, yang dilaksanakan oleh Expertise France, tentang pengelolaan perikanan di Perancis; • studi kelayakan tentang modernisasi 3 pelabuhan dalam proyek pelabuhan <i>Ecofishing</i> .	Sedang berjalan
Kerja sama teknis dan studi kelayakan untuk mendukung proyek Ecoports	CID1105	AFD	N/A	01/10/2021	Subsidi - €400.000	FEXTE ini mendanai aktivitas yang menyertai proyek Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan (CID1109): 1) Kemitraan antara KKP dan KADIN Internasional Hauts-de-France, pengelola pelabuhan Boulogne dan Calais. 2) Studi kelayakan untuk modernisasi pelabuhan perikanan Cilacap di Jawa.	Sedang berjalan
Kajian tentang keuangan hijau	CID1106	AFD	N/A	09/12/2020	Subsidi - €100.000	Tujuan dari hibah ini adalah untuk: • Menginventarisasi pendanaan iklim di Indonesia: kebijakan saat ini, isu-isu utama, program bantuan teknis yang saat ini dilakukan oleh donor lain. • Melalui serangkaian wawancara dengan para pemain utama dalam sistem keuangan Indonesia, mengusulkan konsep untuk program bantuan teknis yang akan menjawab tantangan penghijauan sistem keuangan dengan melibatkan badan pengatur dan pengawasan	Selesai

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
						perbankan, dan tindakan untuk membantu lembaga keuangan di Indonesia meningkatkan praktik mereka dengan tujuan untuk lebih memahami risiko iklim.	
Penangkapan ikan Ecports	CID1109	AFD	Ya	23/12/2022	Pinjaman pemerintah - €105 juta	<p>Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendukung modernisasi empat pelabuhan perikanan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja dan keberlanjutan sesuai dengan standar internasional. Secara lebih spesifik, proyek ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan efisiensi, daya tarik, dan tata kelola; meningkatkan kualitas sanitasi, ketertelusuran dan nilai tambah produk ikan; mengelola dampak dan tantangan lingkungan dan iklim. 	Sedang berjalan
Ketahanan sistem keuangan FBPP I	CID1111	AFD	Ya	26/11/2020	Pinjaman pemerintah - €100 juta	<p>AFD telah ikut membiayai program reformasi multi-tahun dengan Bank Dunia yang berfokus pada tiga bidang berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kedalaman sektor keuangan dengan membuatnya lebih inklusif, meningkatkan berbagai produk yang tersedia dan memobilisasi tabungan jangka panjang; meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kreditur, dan dengan demikian mendorong interoperabilitas sistem pembayaran dan perlindungan data pribadi; memperkuat daya tahan sektor keuangan melalui penerapan praktik-praktik keuangan yang berkelanjutan dan mekanisme untuk menanggulangi risiko bencana alam. 	Selesai
Program Banjir FEXTE	CID1113	AFD	N/A	13/07/2022	Subsidi - €800.000	Hibah dari sumber daya FEXTE dimaksudkan untuk membiayai program bantuan teknis untuk mendukung pinjaman kebijakan publik "Disaster Resilience Enhancement and Management" (DREAM). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan kota Semarang terhadap risiko iklim	Sedang berjalan

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
Ketahanan sistem keuangan FBPP II	CID1118	AFD	Ya	29/07/2022	Pinjaman pemerintah - €50 juta	<p>AFD telah membiayai bersama program reformasi multi-tahun dengan WB berdasarkan tiga poros berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kedalaman sektor keuangan dengan membuatnya lebih inklusif, meningkatkan berbagai produk yang tersedia dan memobilisasi tabungan jangka panjang; meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kreditur, dan dengan demikian mendorong interoperabilitas sistem pembayaran dan perlindungan data pribadi; memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui penerapan praktik-praktik keuangan yang berkelanjutan dan mekanisme untuk menanggulangi risiko bencana alam. 	Selesai
Dukungan untuk pengembangan sektor produksi energi angin oleh operator listrik Indonesia	CID1119	AFD	N/A	24/07/2021	Subsidi - €1.3 juta	Tujuan dari operasi ini adalah untuk membiayai studi kelayakan untuk pinjaman pembangkit listrik tenaga angin di Banten dan peta jalan aktivitas yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembangkan energi angin di Indonesia.	Sedang berjalan
Studi persiapan untuk Proyek Angkutan Massal Indonesia	CID1121	AFD	N/A	08/10/2021	Subsidi - €400.000	Tujuan hibah ini adalah untuk memberikan kontribusi pada persiapan studi untuk program transportasi perkotaan (CID1117) yang dibiayai bersama oleh AFD dan Bank Dunia.	Selesai
DREAM 2 Genre FAPS	CID1122	AFD	N/A	02/07/2021	Subsidi - €139.830	Kontrak yang didanai FAPS ini adalah untuk penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam kebijakan PRB Indonesia di tingkat nasional dan daerah.	Selesai
Pengurangan sampah plastik dan sampah laut di Asia Timur dan Selatan	EF	N/A	01/03/2019	Subsidi - €9 juta	Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk mendukung strategi Eropa tentang plastik di Asia Timur dan Asia Tenggara (Cina, Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, termasuk Komisi Sungai Mekong dan ASEAN), dengan demikian membantu memperkuat kerja sama Uni Eropa/negara-negara di bidang ekonomi sirkular serta pengurangan sampah plastik dan sampah laut.	Selesai	

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
Tindak lanjut dari rencana strategis keanekaragaman hayati		EF	N/A	01/09/2018	Subsidi - €4.5 juta	<p>Tujuan dari proyek PAGODA adalah untuk membantu sejumlah negara mitra Uni Eropa dalam mempersiapkan COP15 CBD (Konvensi Keanekaragaman Hayati), yang akan diselenggarakan di Beijing pada akhir tahun 2020.</p> <p>Tujuannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menetapkan kondisi untuk mencapai kesepakatan ambisius di COP15 CBD 2) Untuk membangun dialog antara Uni Eropa dan sekitar dua puluh negara mitra tentang masalah ini (khususnya Tiongkok) 3) Untuk menciptakan dan mempertahankan momentum pada masalah ini untuk memfasilitasi kemajuan di COP15 dan seterusnya. 	Selesai
Dukungan terhadap reformasi fiskal II		EF	N/A	01/04/2019	Subsidi - €900.000	<p>Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendukung pelaksanaan reformasi fiskal dan anggaran di Indonesia melalui tiga poros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas belanja publik 2) Memperkuat manajemen perpajakan 3) Memperluas kebijakan perpajakan. <p>Tujuan ini ingin dicapai dengan memobilisasi keahlian Prancis dari DGFiP (Direktorat Jenderal Keuangan Publik), dengan mempertimbangkan kebutuhan departemen BKF dan DJP Kementerian Keuangan di bidang audit pajak, PPN, perpajakan digital, dan BEPS (Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba).</p>	Selesai
Memperkuat kerja sama keamanan dengan dan di Asia		EF	N/A	01/02/2020	Subsidi - €13.5 juta	<p>Proyek Keamanan Asia sejalan dengan arahan politik Uni Eropa untuk meningkatkan aksi dan visibilitasnya di Asia dalam bidang keamanan. Secara khusus, UE ingin memperkuat kehadirannya di organisasi-organisasi regional utama seperti ASEAN, ARF, dan ADM++. Proyek yang berlangsung selama 48 bulan ini mencakup empat bidang: siber, maritim, Pertahanan dan Keamanan Bersama (CSDP)/ penjagaan perdamaian dan pencegahan radikalisme kekerasan.</p>	Selesai
CFT (Penanggulangan Pendanaan Terorisme)		EF	N/A	01/06/2019	Subsidi - €20 juta	<p>Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara mitra untuk menerapkan kerangka kerja yang efektif dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan kerangka kerja negara-negara mitra</p>	Selesai

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
						terhadap standar internasional, yaitu metodologi <i>Counter Financing of Terrorism (CFT)</i> dan <i>Anti-Money Laundering (AML)</i> Uni Eropa. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung kapasitas analitis dan operasional para pemangku kepentingan yang terlibat dan untuk mempromosikan peluang kerja sama antara para pemangku kepentingan peradilan dan keuangan di bidang ini di tingkat nasional, regional, dan internasional.	
Pengembangan kapasitas dalam keselamatan dan keamanan zona laut (CRIMARIO II)	EF	N/A	30/04/2020	Subsidi - €17 juta	Uni Eropa telah memerangi ancaman terhadap jalur komunikasi maritim sejak peluncuran program Rute Maritim Kritis (<i>Critical Maritime Routes-CMR</i>) pada tahun 2009. CRIMARIO I (2015 - 2019), salah satu inisiatif program CMR yang mencakup wilayah Samudra Hindia Barat, telah dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim melalui berbagai informasi, pengembangan kapasitas, dan pelatihan. Berdasarkan pengalaman CRIMARIO I, CRIMARIO II memperluas cakupan geografinya, pertama-tama ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, lalu sekarang ke Pasifik, untuk berkontribusi pada ruang maritim yang lebih aman melalui peningkatan kerja sama lintas-sektoral, antardinas, dan antardaerah. Meskipun pertukaran informasi tetap menjadi landasan proyek CRIMARIO, ruang lingkup fase II meluas ke aspek-aspek lain seperti penerapan hukum maritim.	Sedang berjalan	
Statistik Uni Eropa-ASEAN-Kompas (memantau proses integrasi dan statistik)	EF	N/A	29/07/2013	Subsidi - €5.8 juta	Tujuan keseluruhan dari kerja sama teknis yang didanai oleh Uni Eropa untuk EU-ASEAN Capacity Building in Monitoring Integration Progress and Statistics Project (Proyek COMPASS) adalah untuk mendukung integrasi ASEAN dengan meningkatkan ketersediaan dan penggunaan informasi yang lebih tepat waktu, dapat dibandingkan dan relevan untuk memfasilitasi pemantauan dan pengambilan keputusan. Semua Negara Anggota ASEAN (AMS) serta Sekretariat ASEAN (ASEC) secara aktif terlibat dalam semua bagian dari proyek ini.	Selesai	
Indonesia: penangkapan ikan berkelanjutan	EF	N/A	03/07/2019	Subsidi - €63.000	Penyelenggaraan perjalanan studi tentang isu-isu perikanan berkelanjutan untuk pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari CID1109.	Selesai	

Nama	Kode	Entitas grup AFD	Proyek layak prosedur ADD	Tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan	Instrumen pendanaan dan jumlah	Tujuan utama proyek (sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek)	Status
Capsquare II	PID1028	Proparco	N/A	2019	Ekuitas pemegang saham	Reksa dana ini merupakan penerus dari Reksa Dana Capsquare Asia Partners Fund I (Capsquare I), yang telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 83 juta pada tahun 2013. Dipimpin oleh tim manajemen Capsquare Asia Partners (Capsquare), kendaraan baru ini memiliki target dana sebesar USD 150 juta dan telah menyelesaikan penutupan pertamanya pada bulan Desember 2017.	Selesai
Indosurya	PID1033	Proparco	N/A	2021	Ekuitas pemegang saham	Indosurya Inti Finance adalah lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman kepada individu dan UKM di Indonesia, yang memainkan peran penting dalam mendukung bisnis yang sedang berkembang dan bisnis yang sudah mapan. Didirikan pada tahun 2011, Indosurya Inti Finance saat ini mengandalkan jaringan yang kuat dengan 70 kantor cabang yang memungkinkan lembaga keuangan ini untuk memenuhi kebutuhan segmen UKM dengan lebih baik.	Sedang berjalan
Dana FHP II	PID1026	Proparco	N/A	2017	Ekuitas pemegang saham	Falcon House Partners (FHP) adalah manajer aset independen yang berbasis di Jakarta dan Singapura yang berinvestasi pada modal pertumbuhan, terutama di Indonesia, melalui kepemilikan saham minoritas atau mayoritas yang signifikan di UKM dan perusahaan-perusahaan berkapitalisasi menengah. FHP, setelah melakukan penggalangan dana pada tahun 2012 dan kemudian mengerahkan dana pertama sebesar \$212 juta (FHP I), telah menyelesaikan penutupan akhir kendaraan baru (FHP II) pada bulan November 2016 dengan nilai \$400 juta. Filosofi investasi dari dana FHP I & II adalah untuk berinvestasi di berbagai sektor yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendukung bisnis milik keluarga atau bisnis yang tidak terlalu terlembaga yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat untuk menjadi grup yang memenuhi kriteria tata kelola dan manajemen terbaik.	Selesai
Komida	PID1034	Proparco	N/A	2021	Ekuitas pemegang saham	Didirikan pada tahun 2005 setelah tsunami di Indonesia, Komida adalah koperasi simpan pinjam untuk perempuan berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro ini bersertifikat Smart Campaign dan menawarkan produk keuangan dan non-keuangan, seperti pelatihan keuangan. Komida telah menjadi lembaga keuangan mikro terbesar kedua, dengan cabang di 12 provinsi dan lebih dari 750.000 nasabah, semuanya perempuan dan hampir seluruhnya berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, Komida memainkan peran utama dalam inklusi keuangan di negara dengan jumlah orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank masih tinggi. Lembaga keuangan mikro ini juga dikenal dengan pinjaman sosialnya, seperti pinjaman pendidikan, pinjaman sanitasi, dan pinjaman renovasi rumah.	Sedang berjalan

Lampiran B

Matriks analisis kontribusi Grup AFD terhadap TPB di negara mitra

Tabel di bawah ini merupakan template analisis kontribusi Grup AFD terhadap TPB di suatu negara, yang dapat digunakan sebagai matriks untuk evaluasi di masa mendatang terkait topik ini. Tabel ini menyajikan secara ringkas dan visual (dengan menggunakan logo TPB seperti yang ditampilkan sebelumnya) kemajuan yang telah dicapai oleh negara tersebut dalam pencapaian TPB serta kontribusi dari Grup AFD.

	Perkembangan jalur pencapaian TPB di negara mitra	Operasi Grup AFD di negara yang berkontribusi di TPB		
Ambisi terhadap TPB	Komitmen yang diambil oleh negara terkait TPB, baik di tingkat nasional maupun internasional	Sebutkan teks-teks referensi utama serta acuan yang dibuat terkait ambisi untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).	Ambisi Grup AFD dalam mendukung pencapaian TPB di negara mitra	Analisis terhadap referensi TPB dalam strategi negara Grup AFD: mencakup acuan terhadap berbagai TPB dan aspek pendekatan terintegrasi (khususnya keterkaitan antar TPB).
Sumber daya yang digunakan	Upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai TPB.	Di luar komitmen nasional dan internasional, kebijakan apa saja yang telah dijalankan, program-program apa yang telah dilaksanakan, dan berapa besar dana yang telah dialokasikan?	Upaya yang dilakukan oleh Grup AFD untuk mendukung pencapaian TPB oleh negara mitra	Di luar penyebarluasan dalam strategi negara, apa saja komitmen kumulatif yang telah dibuat oleh Grup AFD dan alat/instrumen apa saja yang telah dimobilisasi (dialog kebijakan publik, penelitian, hibah, pinjaman, dll.)?
Hasil	Hasil yang diperoleh	Apa saja hasil yang telah dicapai untuk masing-masing TPB (dijabarkan per TPB)? Sumber utama: Laporan Tinjauan Nasional Sukarela (VNR) tentang TPB Gunakan kembali elemen visual TPB (logo tiap TPB dan penanda status pencapaian, dll.)	Hasil yang diperoleh	Hasil apa saja terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah didukung oleh operasi Grup AFD? Jika memungkinkan, sebutkan kontribusi proyek terhadap indikator TPB dan lakukan evaluasi kualitatif terhadap dampaknya.
Prospek dan rekomendasi	Apa saja tantangan utama terkait TPB yang diungkap dalam evaluasi ini, yang ingin ditangani oleh negara mitra dan di mana Grup AFD dapat memberikan nilai tambah?			

Catatan: Sesuai dengan kerangka acuan, dalam evaluasi ini, analisis tidak dilakukan per TPB, melainkan berdasarkan pendekatan terpadu terhadap TPB. Oleh karena itu, matriks ini tidak dapat diisi secara menyeluruh dan kuat.

Daftar Singkatan dan Akronim

AADD	Analisis dan Pendapat Pembangunan Berkelanjutan
AES	Dukungan Lingkungan dan Sosial
AFD	<i>Agence française de développement</i>
APEC	Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik
APD	Bantuan Pembangunan Resmi
ASEAN	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
BAD / ADB	Bank Pembangunan Asia
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BEPS	Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BM / WB	Bank Dunia
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional (Indonesia)
CCI / KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
CDB	Konvensi Keanekaragaman Hayati
CDN / NDC	Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional
CFT / PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
CMR	Rute laut strategis
COP	Konferensi Para Pihak
DGFIP	Direktorat Jenderal Keuangan Publik
DGT / DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DREAM <i>(Disaster Resilience Enhancement and Management Program)</i>	Program Peningkatan dan Pengelolaan Ketangguhan Bencana
FAPS	Fasilitas untuk Permulaan, Persiapan, dan Pemantauan Proyek
FBPP	Pendanaan anggaran untuk kebijakan publik
FEXTE	Dana untuk Keahlian Teknis dan Pertukaran Pengalaman
FHP	<i>Falcon House Partners</i>
FICOL	Fasilitas Pembiayaan untuk Pemerintah Daerah
GES	Gas rumah kaca
JET-P	<i>Just Energy Transition Partnerships</i>
JICA <i>(Japan International Cooperation Agency)</i>	Badan Kerja Sama Internasional Jepang
KfW <i>(Kreditanstalt für Wiederaufbau)</i>	Bank Pembangunan Jerman
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
OCDE / OECD	Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
ODD / TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PME / UKM	Usaha Kecil dan Menengah
PSDC / CSDP	Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama
PT SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur
RRC / PRB	Pengurangan Risiko Bencana
SCAC	Layanan Kerja Sama dan Aksi Budaya
SIEP	<i>Sustainable and inclusive Energy Program</i>
UE	Uni Eropa

**Agence française
de développement**
5, rue Roland Barthes
75012 Paris | France
www.afd.fr

**Direktorat Inovasi,
Strategi, dan Riset (ISR).
Departemen Evaluasi dan
Pembelajaran (EVA).**

Penerbit Agence française de développement (AFD) menerbitkan hasil evaluasi serta penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan. Dilakukan dengan banyak mitra dari Utara dan Selatan, studi-studi ini berkontribusi pada analisis tantangan yang dihadapi planet ini, untuk lebih memahami, memprediksi, dan bertindak demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dengan katalog lebih dari 1.000 judul, dan rata-rata 80 karya baru yang diterbitkan setiap tahun, Penerbit Agence française de développement mendukung penyebaran pengetahuan dan keahlian, melalui koleksi mereka sendiri dan kemitraan-kemitraan utama. Temukan semuanya dengan akses terbuka di editions.afd.fr. Demi dunia kita bersama.

Penanggung Jawab Publikasi Rémy Rioux
Pemimpin Redaksi Jean-Claude Pires
Desain grafis MeMo, JulieGilles, D. Cazeils
Perancangan dan Pelaksanaan edeo-design.com
Penyimpanan legal Triwulan I tahun 2025
ISSN 2425-7087
Dicetak oleh unit percetakan AFD

Untuk membaca publikasi lain dalam koleksi ExPost: Publications and media | AFD - Agence Française de Développement

Kredit dan Perizinan
License Creative Commons
Atribusi - Nonkomersial
- Tanpa perubahan
[https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

